

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon

Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

YOLA ARINDA NASTITI

142180038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon

Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta**

Disusun Oleh:

YOLA ARINDA NASTITI

142180038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon

Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

YOLA ARINDA NASTITI
142180038

Telah disetujui dengan baik.

Yogyakarta, 31 Maret 2022.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Retno Yulianti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 2 7207 98 0192 1

Kunti Sunaryo, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 2 7311 98 0182 1

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta



Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si., Ak., CRP.
NIK. 2 7401 98 0191 1

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon

Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

Disusun Oleh:

YOLA ARINDA NASTITI

142180038

Telah dipresentasikan di depan penguji pada tanggal 14 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi

Susunan Dewan Penguji Dosen

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Retno Yulianti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 2 7207 98 0192 1

Kunti Sunaryo, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 2 7311 98 0182 1

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II



Dr. Kusharyanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 2 7004 97 0160 1

Marita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 2 7403 97 0159 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yola Arinda Nastiti

No. Mhs : 142180038

Judul Skripsi : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 14 Mei 2022



Yola Arinda Nastiti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur, atas segala bantuan, bimbingan, doa dan dukungan, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada saya.
2. Orang tua tercinta Ibu Warti dan Bapak Isbiyanto yang tidak ada habisnya memberikan dukungan dan doa penuh atas segala kehidupan saya.
3. Simbah saya Wiyono dan Tumiyem yang telah memberikan saya dukungan dan doa penuh untuk saya.
4. Bapak Prof. M. Irhas Effendi, M.Si., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Sujatmika, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si, Ak., selaku ketua jurusan prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Sri Suryaningsum, S.E, M.si, Ak., selaku dosen wali yang selalu mengayomi, menuntun, memberikan dukungan dan selalu memberi nasihat pada perkuliahan saya selama ini.
8. Ibu Dr. Retno Yulianti, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I yang sabar bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat demi terselesaikan skripsi ini.

9. Ibu Kunti Sunaryo, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II yang sabar bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat demi terselesaikan skripsi ini.
10. Kakak saya Candra Desta Ardianto yang memberikan support dan membantu segalanya untuk kelancaran skripsi ini.
11. Teman rekan kerja saya Mas Dymas, Mba Vika, Pak Joko, dan Pak Ngatijo yang selalu memberikan semangat, menasehati serta memberikan dukungan penuh untuk kelancaran skripsi ini.
12. Teman-teman Guru TPA Masjid Baiturahman Mas Hendi, Mba Nurul, Pak Min, dan Mba Trias serta anak-anak yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama ini.
13. Sahabat saya Desi, Junjung, Mieleni, Azza, Lia, Reza, Nissa, Mba iis, Fani, Anggi, Ma'in yang sudah berjuang menemani dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
14. Sahabat, teman, kakak tingkat dan keluarga saya KARPET, GENRE, MUDA BERSINERGI, Akuntansi UPNYK 2018, dan KSM A+ yang selalu ada disaat susah maupun senang, selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, support dan membantu segalanya untuk kelancaran skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun selalu saya sebut dalam doa. Terima kasih atas bantuan, nasihat, dan pembelajarannya.

16. In particular, I dedicate this thesis to myself. Thank you for fighting my ego, fighting laziness to reach my goals and making both people proud. Thank you for being enthusiastic even though many people underestimate it. Thank you myself for completing this final project well and never giving up, the spirit to step into the next life journey.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)”** dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Tugas akhir skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Selama proses penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. M. Irhas Effendi, M.Si., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Zuhrohtun, S.E., M.Si, Ak., selaku ketua jurusan prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Sujatmika, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Retno Yulianti, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing I yang sabar bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat demi terselesaikan skripsi ini.

5. Ibu Kunti Sunaryo, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing II yang sabar bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat demi terselesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staff, serta karyawan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan sebagai dasar Penulisan untuk dapat menyusun skripsi ini serta telah membantu dalam kegiatan perkuliahan selama ini.
7. Kepala, staff, serta karyawan SAMSAT se Provinsi DIY (SAMSAT Kulon Progo, SAMSAT Kota Yogyakarta, SAMSAT Bantul, SAMSAT Sleman, SAMSAT Gunung Kidul) yang telah memberikan izin, memberikan masukan, memberikan arahan, serta dukungan untuk melakukan observasi guna penelitian skripsi ini.
8. Panewu, staff, serta semua karyawan Kapaewon Sentolo yang sudah memberikan izin untuk melakukan penyebaran kuesioner di berbagai Desa yang ada di Kapanewon Sentolo.
9. Lurah, staff, serta karyawan Desa yang ada di Kapanewon Sentolo sudah memberikan izin seta membantu dalam penyebaran kuesioner penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran untuk penulisan lebih baik lagi.

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Penulis



Yola Arinda Nastiti

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon
Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

Oleh:

Yola Arinda Nastiti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, the drive thru SAMSAT system, progressive tax rates, and tax socialization on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. This research was conducted at SAMSAT Kulon Progo precisely in Kapanewon Sentolo. The population in this study were taxpayers who have motorized vehicles in the Kapanewon Sentolo area, Kulon Progo Regency, a total of 32,708 taxpayers and the number of samples in this study were 110 respondents with the sampling method using convenience sampling. This data collection is done by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. Based on the results of multiple linear regression analysis shows that taxpayer awareness, tax sanctions, and tax socialization affect taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes, while the drive thru system and progressive tax rates have no effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes.

Keywords: *Taxpayer awareness, tax sanctions, drive thru system, progressive tax rates, and tax socialization.*

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Kapanewon

Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)

Oleh:

Yola Arinda Nastiti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di SAMSAT Kulon Progo tepatnya di Kapanewon Sentolo. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mempunyai kendaraan bermotor berada di wilayah Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo sejumlah 32.708 Wajib Pajak dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sedangkan sistem samsat *drive thru* dan tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem samsat *drive thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan.

MOTTO

“Dan bersabarlah! Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Anfal: Ayat 46)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: Ayat 286)

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”

(B. J. Habibie)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Batasan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
2.1. Landasan Teori	14
2.1.1. Definisi Pajak	14
2.1.2. Ciri-ciri Pajak Daerah	18
2.1.3. Fungsi Pajak Daerah	18
2.1.4. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah	19
2.1.5. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak	20
2.1.7. Sanksi Pajak	21
2.1.8. Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	21
2.1.9. Tarif Pajak Progresif	22
2.1.10. Sosialisasi Perpajakan	22

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Konseptual	28
2.4. Hipotesis Penelitian	29
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	30
2.4.3. Pengaruh Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	31
2.4.4. Pengaruh Tarif Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	32
2.4.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Rancangan Penelitian	34
3.2. Populasi	34
3.3. Sampel	35
3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel.....	36
3.4.1. Klasifikasi Variabel.....	36
3.4.1.1. Variabel Dependen (Y)	37
3.4.1.2. Variabel Independen (X).....	37
3.4.2. Definisi Operasional Variabel.....	38
3.4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak	38
3.4.2.2. Sanksi Pajak.....	38
3.4.2.3. Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	39
3.4.2.4. Tarif Pajak Progresif	40
3.4.2.5. Sosialisasi Perpajakan	41
3.4.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak	42
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.6. Prosedur Pengambilan Data	43
3.7. Uji Instrumen Data	43
3.7.1. Uji Validitas	44
3.7.2. Uji Reliabilitas	44
3.8. Teknik Analisis Data	44

3.8.1.	Analisis Statistik Deskriptif	44
3.9.	Uji Normalitas	45
3.10.	Uji Hipotesis.....	45
3.10.1.	Uji Analisis Linear Berganda.....	45
3.10.2.	Uji Kelayakan Model (uji F).....	46
3.10.3.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	47
3.10.4.	Uji t	47
BAB IV	HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1.	Uji Instrumen Data	48
4.1.1.	Uji Validitas	48
4.1.2.	Uji Reliabilitas	50
4.2.	Data Penelitian	51
4.2.1.	Deskripsi Sampel Penelitian	51
4.2.2.	Distribusi Frekuensi Variabel.....	52
4.2.2.1.	Kesadaran Wajib Pajak.....	52
4.2.2.2.	Sanksi Pajak.....	53
4.2.2.3.	Sistem SAMSAT Drive Thru	53
4.2.2.4.	Tarif Pajak Progresif.....	54
4.2.2.5.	Sosialisasi Perpajakan.....	55
4.2.2.6.	Kepatuhan Wajib Pajak	55
4.3.	Demografi Responden Penelitian.....	56
4.4.	Analisis dan Hasil Pembahasan.....	57
4.4.2.	Hasil Statistik Deskriptif.....	57
4.4.3.	Uji Normalitas.....	60
4.4.4.	Hasil Uji Hipotesis	62
4.4.4.1.	Uji Analisis Regresi Linear Berganda	62
4.4.4.2.	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	62
4.4.4.3.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.4.4.4.	Uji (t).....	64
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.5.1.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	67
4.5.2.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	68

4.5.3. Pengaruh Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	69
4.5.4. Pengaruh Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	71
4.5.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	72
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Keterbatasan	75
5.3. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor DIY Tahun 2020	2
Tabel 1. 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Menunggak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2020.....	4
Tabel 1. 3. Pendataan Kendaraan Bermotor Kapanewon Sentolo Tahun 2020.....	5
Tabel 1. 4. Jumlah Kendaraan Bermotor Kapanewon Sentolo Tahun 2017-2020..	6
Tabel 1. 5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kapanewon Sentolo Tahun 2017-2020.....	7
Tabel 2. 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1. Operasionalisasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak	38
Tabel 3. 2. Operasionalisasi Variabel Sanksi Pajak.....	39
Tabel 3. 3. Operasionalisasi Variabel Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	40
Tabel 3. 4. Operasionalisasi Variabel Tarif Pajak Progresif.....	41
Tabel 3. 5. Operasionalisasi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	42
Tabel 3. 6. Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	42
Tabel 4. 1. Hasil Uji Instrumen Validitas	49
Tabel 4. 2. Hasil Uji Instrumen Reliabilitas.....	51
Tabel 4. 3. Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	52
Tabel 4. 4. Frekuensi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak.....	52
Tabel 4. 5. Frekuensi Jawaban Sanksi Pajak.....	53
Tabel 4. 6. Frekuensi Jawaban Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	54
Tabel 4. 7. Frekuensi Jawaban Tarif Pajak Progresif.....	54
Tabel 4. 8. Frekuensi Jawaban Sosialisasi Perpajakan	55
Tabel 4. 9. Frekuensi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak	56
Tabel 4. 10. Demografi Responden.....	57
Tabel 4. 11. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 12. Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4. 13. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4. 14. Hasil Uji F.....	63
Tabel 4. 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi	64
Tabel 4. 16. Hasil Uji t.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian	81
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	88
Lampiran 3 Tabulasi Data Responden	94
Lampiran 4 Frekuensi Jawaban Responden	112
Lampiran 5 Hasil Olahan Data Statistik	114
Lampiran 6 Dokumentasi Penyebaran Kuesioner	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Provinsi. Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa menurut undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hasil pajak tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Namun masih ada upaya dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat mempunyai kesadaran, wajib pajak melakukan pembayaran secara sukarela bukan keterpaksaan (Efriyenty, 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak, maka dari itu pemerintah daerah provinsi hendaknya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Hal ini karena dengan

tingginya pendapatan daerah dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas akan terlaksana dengan baik (Syah & Krisdiyawati, 2017).

Seiring perkembangan zaman maka alat transportasi semakin modern, salah satunya yaitu kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor maka perlu adanya dukungan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan marka jalan yang tentunya dibuat oleh pemerintah dengan dana tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah mengenakan pemungutan pajak pada pemilik kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah karena pajak kendaraan bermotor termasuk pendapatan asli daerah. Tabel 1.1 berikut menjelaskan perbandingan jumlah kendaraan se DIY.

Tabel 1. 1.
Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor DIY Tahun 2020

Kabupaten	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Membayar PKB (Unit)	Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Pembayaran PKB (Unit)	Yang Tidak Melakukan Pembayaran (%)
Kota Yogyakarta	317.551	303.360	14.191	4,46%
Sleman	634.741	621.490	13.251	2,08%
Gunung Kidul	287.643	271.511	16.132	5,60%
Bantul	475.945	406.945	15.000	3,15%
Kulon Progo	186.794	172.366	17.428	9,33%

Sumber: SAMSAT Provinsi DIY

Dari Tabel 1.1 di atas jumlah kendaraan bermotor Kabupaten Kota Yogyakarta berjumlah 317.551 unit, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 303.360 unit, dan wajib pajak menunggak dalam membayar

pajak kendaraan bermotor yaitu berjumlah 14.191 unit atau 4,46%. Kabupaten Sleman berjumlah 634.741 unit, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 621.490 unit, lalu terdapat wajib pajak menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu berjumlah 13.251 unit atau 2,08%. Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 287.643 unit, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 271.511 unit, lalu terdapat wajib pajak menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu berjumlah 16.132 unit atau 5,60%. Kabupaten Bantul berjumlah 475.945 unit, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 406.945 unit, lalu terdapat wajib pajak menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu berjumlah 15.000 unit atau 3,15%. Kabupaten Kulon Progo berjumlah 186.794 unit, wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 172.366 unit, lalu terdapat wajib pajak menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu berjumlah 17.428 unit atau 9,33%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor paling tinggi yaitu terdapat pada kabupupaten Kulon Progo, sehingga peneliti akan meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Kulon Progo. Tabel 1.2 berikut menjelaskan Jumlah Kendaraan menunggak membayar pajak Kabupaten Kulon Progo se Kapanewon.

Tabel 1. 2.
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Menunggak Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2020

Kapanewon	2017	2018	2019	2020
Wates	-	-	-	526
Pengasih	3.490	5.329	5.654	7.505
Kokap	2.885	4.263	4.613	5.714
Temon	2.683	4.025	4.393	5.734
Panjatan	2.581	4.014	4.293	5.622
Galur	4.336	5.959	6.289	7.754
Lendah	4.223	6.168	6.176	7.730
Sentolo	5.753	7.749	8.276	10.422
Nanggulan	3.270	4.635	4.787	6.022
Kalibawang	2.723	3.784	4.011	5.070
Samigaluh	2.349	3.161	3.360	4.154
Girimulyo	2.056	2.835	2.937	3.769

Sumber: SAMSAT Kulon Progo

Dari Tabel 1.2 di atas sebanyak 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa Kapanewon Sentolo termasuk Kapanewon yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor paling tinggi. Pada tahun 2017 s.d. tahun 2020 Kapanewon Sentolo juga mengalami kenaikan wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, peneliti mengambil objek di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Tabel 1.3 berikut menjelaskan data pendapatan kendaraan bermotor Kapanewon Sentolo.

Tabel 1. 3.

Data Pendataan Kendaraan Bermotor Kapanewon Sentolo Tahun 2020	
Jumlah Data Yang Menunggak Membayar Pajak (Belum Mendaftar Ulang)	10.422
Kendaraan masih dimiliki	8.052
WP pindah alamat	463
Kendaraan sudah dijual	675
Kendaraan ditarik Dealer	67
Alamat WP tidak dikenal	53
Rumah WP kosong	46
WP pinjam nama	38
Kendaraan Rusak Berat	996
Kendaraan Hilang	32

Sumber: SAMSAT Kabupaten Kulon Progo

Dari data tersebut Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak Kapanewon Sentolo menunggak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu berjumlah 8.052, terdapat wajib pajak yang sudah pindah rumah, kendaraannya sudah dijual, kendaraan wajib pajak ditarik oleh dealer, alamat wajib pajak tersebut tidak dikenal, rumah wajib pajak kosong, wajib pajak kendaraan bermotor meminjam nama, kendaraan bermotor tersebut rusak berat (jika rusak berat maka pajak kendaraan bermotor tersebut diblokir) serta kendaraan bermotor wajib pajak hilang. Tabel 1.4 berikut menjelaskan jumlah kendaraan bermotor Kapanewon Sentolo.

Tabel 1. 4.
Jumlah Kendaraan Bermotor Kapanewon Sentolo Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2017	24.711
2018	28.193
2019	30.006
2020	32.708

Sumber: SAMSAT Kulon Progo

Semakin tinggi tingkat kendaraan bermotor, seharusnya berdampak baik bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, pajak dipungut oleh pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat juga. Namun dengan bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2020, masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan.

Kepala Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kabupaten Kulon Progo atau SAMSAT Kulon Progo menjelaskan animo masyarakat untuk menggunakan program pembebasan pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 ini cukup tinggi. Pada akhir Desember 2020, program ini telah digunakan oleh sekitar 34.000 wajib pajak. “Antusiasmenya sangat bagus, karena ada 34.000 wajib pajak yang memanfaatkan program ini, dengan rincian 30.000 untuk roda dua dan 4.000 untuk roda empat,” kata Bagiya Rakhmadi, Ketua SAMSAT Kulon Progo, Minggu (3/1). 2021). Dengan jumlah itu, kata Bagiya, total nilai denda bebas pajak yang diterima negara mencapai sekitar Rp. 3,75 miliar. Bagiya mengatakan program bebas pajak sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di masa pandemi. Oleh karena itu, diharapkan program yang sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 101/2020 tentang Swakelola atau Sanksi perpajakan hingga Juni 2021 ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh

wajib pajak. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan, salah satunya karena lupa tanggal pembayaran membayar pajak. Dapat dilihat pada tabel 1.4 bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data diperoleh dari kantor SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Sentolo, pada akhir tahun 2020 terdapat 10.422 total wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan. Tabel 1.5 berikut menjelaskan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. 5.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Kapanewon Sentolo Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Membayar PKB (Unit)	Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Pembayaran PKB (Unit)	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	24.711	18.958	5.753	76,71%
2018	28.193	20.444	7.749	72,51%
2019	30.006	21.730	8.276	72,41%
2020	32.708	22.286	10.422	68,13%

Sumber: SAMSAT Kulon Progo

Dapat dilihat pada Tabel 1.5 bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 76,71% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 72,51% dengan berjalannya waktu sampai akhir tahun 2019 tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menurun menjadi sebesar 72,41% hingga mencapai 68,13% di tahun 2020.

Menurut Cahyadi & Jati (2016) kepatuhan adalah suatu sikap disiplin dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan mempunyai arti umum yaitu melaporkan dasar pengenaan pajak dengan benar, menghitung kewajiban dengan benar, tepat waktu dalam pengembalian dan segera membayar jumlah yang dihitung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan masalah utama dalam penerimaan pajak daerah (Cahyadi & Jati, 2016).

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, dan kurangnya sosialisasi perpajakan terhadap manfaat pajak itu sendiri.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat rendah, dapat dilihat pada jumlah tunggakan pajak bermotor di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo yaitu pada tahun 2017 sebesar 5.573 wajib pajak, pada tahun 2018 sebesar 7.749 wajib pajak, pada tahun 2019 sebesar 8.276 dan pada tahun 2020 sebesar 10.422 wajib pajak. Hal ini disebabkan karena banyak warga masyarakat yang belum mendaftarkan ulang di Kabupaten Kulon Progo.

Sanksi pajak menjadi faktor sangat penting dalam mendidik wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan, selain itu sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

perpajakan (tax law), dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Juliantari et al., 2021).

Sistem SAMSAT *drive thru* adalah suatu inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantre di loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat ditangani dengan cepat dan nyaman (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Tarif pajak progresif, alasan peneliti memilih variabel adalah karena pajak progresif dibebankan ke wajib pajak sepenuhnya. Peneliti menduga pajak progresif mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga dapat menumbuhkan perasaan adil bagi seluruh wajib pajak. Tarif pajak progresif ini dikenakan kepada kendaraan bermotor berdasarkan atas nama dan/alamat yang sama sesuai kartu keluarga. Respons Wajib Pajak pada penetapan pajak khususnya tarif pajak progresif dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak. Objek pajak kena pajak progresif adalah kendaraan bermotor pelat hitam atau pribadi dengan penggunaan untuk konsumtif, seperti sedan, jeep, minibus, pick up, station wagon, kabin ganda (Wijayanti & Sukartha, 2018).

Sosialisasi perpajakan menjadi faktor sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Juliantari et al., 2021).

Berdasarkan hal di atas memotivasi penulis untuk meneliti Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yaitu antara lain:

- a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo?
- b. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo?
- c. Apakah sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo?
- d. Apakah tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo?
- e. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menginvestigasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo

- b. Menginvestigasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo
- c. Menginvestigasi pengaruh sistem SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo
- d. Menginvestigasi pengaruh tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo
- e. Menginvestigasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo

1.4. Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini lebih tertata dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan juga tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini membatasi objek penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, wajib pajak, dan juga akademis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Ssentolo, Kabupaten Kulon Progo serta dapat menambah penerimaan pendapatan dalam sektor pajak.

b. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan tentang perpajakan, dan menginvestigasi pentingnya pajak untuk negara kita, sehingga akan menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan uraian tentang berbagai teori yang akan menjadi dasar suatu penelitian ini, teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat tinjauan pustaka, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan juga ada hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, dan model teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok bahasan penelitian, analisis data dan pembahasan masalah diangkat berdasarkan hasil pengolahan dan landasan teori yang terkait.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang bagian akhir dari penelitian, berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu iuran yang harus dibayar rakyat kepada negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan atau balasan jasa secara langsung, tetapi pajak tersebut digunakan demi kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, pajak tersebut dimanfaatkan unruk kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya adalah pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintah lainnya.

Menurut Lembaga Pemungutan Pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat ditetapkan oleh pemerintah pusat yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai belanja negara dan pembangunan yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prosedur administrasi pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat antara lain:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Pajak daerah berbeda dengan pajak pusat, pajak daerah dipungut serta dikelola di tingkat kota maupun provinsi. Hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Prosedur administrasi berlangsung di Badan Keuangan Aset dan Daerah.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pajak daerah sendiri merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum bersifat memaksa. Retribusi daerah merupakan pungutan kepada masyarakat yang telah mempergunakan fasilitas disediakan pemerintah daerah (Maulida, 2018).

Pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota (Mardiasmo, 2009). Jenis pajak yang dikelola di tingkat Provinsi, antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas semua kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun udara. Pajak ini dibayar di muka dan dipungut untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.

Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor bervariasi, sebagai berikut:

- a. Bagi kepemilikan sepeda motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan motor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk setiap kepemilikan kendaraan bermotor selanjutnya sebesar 0,5%.
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor perusahaan dikenakan tarif pajak sebesar 2%.
 - c. Pembagian kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah 0,50%.
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan juga Kendaraan di atas Air
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Pengambilan dan juga Pemanfaatan Air Bawah tanah serta Air Permukaan.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota antara lain:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak pengambilan bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak lain-lain.

Pajak daerah dan retribusi daerah dipungut oleh daerah, hak untuk memungut pajak dan retribusi daerah dijelaskan pada jenis pajak dan ketentuan UU No. 29 Tahun 2009. Namun ada beberapa hal yang membedakan antara Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yaitu antara lain:

1. Restribusi daerah adalah pajak yang wajib digunakan untuk kepentingan negara, sedangkan pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
2. Dalam hal upah atau tunjangan bersifat tidak langsung, sedangkan pungutan bersifat langsung dan nyata.
3. Pajak daerah bertujuan untuk memajukan masyarakat, tetapi tujuan dari retribusi daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat menerima pelayanan dan menjalankan usahanya dari pemerintah.
4. Subjek pajaknya adalah penghasilan, kendaraan bermotor, barang mewah, bangunan dan sebagainya, sedangkan subjek retribusinya adalah orang-orang yang telah menggunakan jasa negara seperti jasa kesehatan dan jasa pasar.
5. Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada waktu pembayarannya. Pajak dibayarkan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan retribusi dibayarkan setiap kali fasilitas yang ada digunakan.

Pajak kendaraan bermotor artinya semua jenis kendaraan darat. Subjek adalah orang perseorangan atau badan yang telah mempunyai atau menguasai

kendaraan, sedangkan objeknya adalah pemilikan atau penguasaan atas semua jenis kendaraan (Puteri et al., 2019).

2.1.2. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Mekari (2018) berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah.
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.1.3. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mekari (2018) berikut ini fungsi pajak daerah antara lain:

- a. Fungsi Anggaran

Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, serta tabungan pemerintah daerah.

- b. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui Pajak Daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintah dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya,

jika pemerintah ingin menarik investor, bisa diberikan keringanan pajak di sektor-sektor tertentu. Dengan demikian, diharapkan ada penyerapan kesempatan kerja.

c. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah menurunkan harga barang dan jasa sehingga dapat menekan inflasi. Namun untuk memenuhi fungsi tersebut, pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, termasuk untuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan sehingga perekonomian antara si kaya dan si miskin tidak terlalu menonjol. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena pajak yang baik meningkatkan kualitas pembangunan.

2.1.4. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mekari (2018) kriteria pemungutan pajak daerah antara lain:

- a. Sifatnya pajak dan bukan restribusi
- b. Objek pajak berada dalam wilayah kabupaten atau kota bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kota atau kabupaten bersangkutan.
- c. Objek dan Dasar Pengenaan Pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Potensi yang memadai, penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

- e. Dampak ekonomi yang positif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber daya ekonomi dan tidak menghambat arus sumber daya ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kapasitas masyarakat.
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, pengenaan pajak tidak memberikan peluang bagi pemerintah daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.1.5. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan yang mempunyai roda beserta gandengannya digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau perlatan lainnya berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Dearah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaran Bermotor. Sedangkan definisi pajak kendaraan bermotor itu sendiri merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penugasan kendaraan bermotor (Awaloedin Indriyanto dkk, 2020).

2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Cahyadi & Jati (2016) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhan seorang wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Idealnya yaitu untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian perpajakan, masyarakat harus terus diajak untuk mengenal, mengakui, menghormati, dan menaati ketentuan

perpajakan yang berlaku. Apabila jumlah kendaraan tersebut bertambah, tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, hal ini dapat mengakibatkan tunggakan dan denda yang cukup tinggi. Namun, kesadaran wajib pajak sering kali menjadi kendala atau masalah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Banyak orang yang tidak menginvestigasi bentuk konkret kompensasi untuk pajak yang telah mereka bayar (Priestnall et al., 2020).

Menurut Ilhamsyah et al., (2016) kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk kontribusi warga dalam meningkatkan pembangunan dan jika menunda membayar pajak maka merugikan daerah.

2.1.7. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax law*). Selain itu, sanksi perpajakan merupakan efek jera bagi wajib pajak untuk tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Puteri et al., 2019). Lebih lanjut, menurut Cong & Agoes (2019) sanksi perpajakan menjadi faktor sangat penting dalam mendidik wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan.

2.1.8. Sistem SAMSAT *Drive Thru*

Sistem SAMSAT *Drive Thru* merupakan layanan pembayaran dan validasi pajak kendaraan bermotor roda empat dari STNK yang berlokasi di luar gedung kantor dengan SAMSAT dan pemilik kendaraan melakukan transaksi pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan bermotornya (Wardani & Rumiyatun, 2017). Semakin

banyak pengguna sistem SAMSAT *drive thru* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.9. Tarif Pajak Progresif

Menurut Mardiasmo (2011) sebagaimana dikutip oleh Latrini & Gayatri (2018), tarif progresif merupakan persentase tarif semakin besar dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki. Tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu: (1) tarif progresif progresif artinya kenaikan persentase yang semakin besar, (2) tarif progresif tetap artinya kenaikan dengan persentase tetap, dan (3) tarif progresif degresif artinya kenaikan persentase yang semakin kecil.

Menurut Wijayanti & Sukartha (2018) tingkat progresif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat progresif ditetapkan oleh Pemerintah untuk ditugaskan kepada Wajib Pajak berdasarkan Objek Pajak. Dengan tarif progresif, semakin banyak wajib pajak mempunyai kendaraan, semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya.

2.1.10. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Cahyadi & Jati (2016) sosialisasi perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan baik dengan menggunakan media cetak (surat kabar, banner, spanduk) atau bisa melalui media komunikasi, media audio visual (radio atau televisi). Selain itu juga bisa dengan cara melakukan seminar pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Menurut Wijayanti & Sukartha (2018) kurangnya sosialisasi berdampak terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sikap disiplin dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan mempunyai arti umum yaitu melaporkan dasar pengenaan pajak dengan benar, menghitung kewajiban dengan benar, tepat waktu dalam pengembalian dan segera membayar jumlah yang dihitung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan masalah utama dalam penerimaan pajak daerah, jika penerimaan pajak yang diperoleh tidak sesuai dengan kenyataan maka memperlambat pembangunan negara (Cahyadi & Jati, 2016).

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang sangat penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang sudah ada jadi menimbulkan keinginan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak tersebut.

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut Tabel 2.1 tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan untuk menginvestigasi hasil-hasil penelitian dari masing-masing variabel.

Tabel 2. 1.
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penulis	Judul, Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Cong & Agoes (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak 2. Pengetahuan pajak 3. Sanksi Pajak <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Puteri et al. (2019)	Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Administrasi 2. Tingkat Pendapatan 3. Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> <p>Dependen:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Tingkatan pendapatan berpengaruh terhadap

	Kasus Kantor Samsat Kota Padang)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3.Samsat <i>drive thru</i> tidak berpengaruh terhadap pajak kendaraan bermotor.
Cahyadi & Jati (2016)	Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Akuntabilitas pelayanan publik 4. Sanksi perpajakan <p>Dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar. 2.Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar. 3.Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar. 4.Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar.

Wardani & Rumiyaun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat <i>Drive Thru</i> Bantul)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak 3. Sistem samsat <i>drive thru</i> 4. Sanksi pajak kendaraan bermotor <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Wijayanti & Sukartha (2018)	Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif progresif 2. Kualitas pelayanan 3. Sosialisasi perpajakan 4. Pengetahuan perpajakan <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan wajib pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif progresif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli.

			<p>3.Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli.</p> <p>4.Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli.</p>
Apriliyani et al. (2020)	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Magetan)</p>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan 2. Kesadaran wajib pajak 3. Tarif pajak Progresif 4. Sanksi perpajakan <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan. 2.Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota.magetan. 3.Tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota magetan. 4.Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap

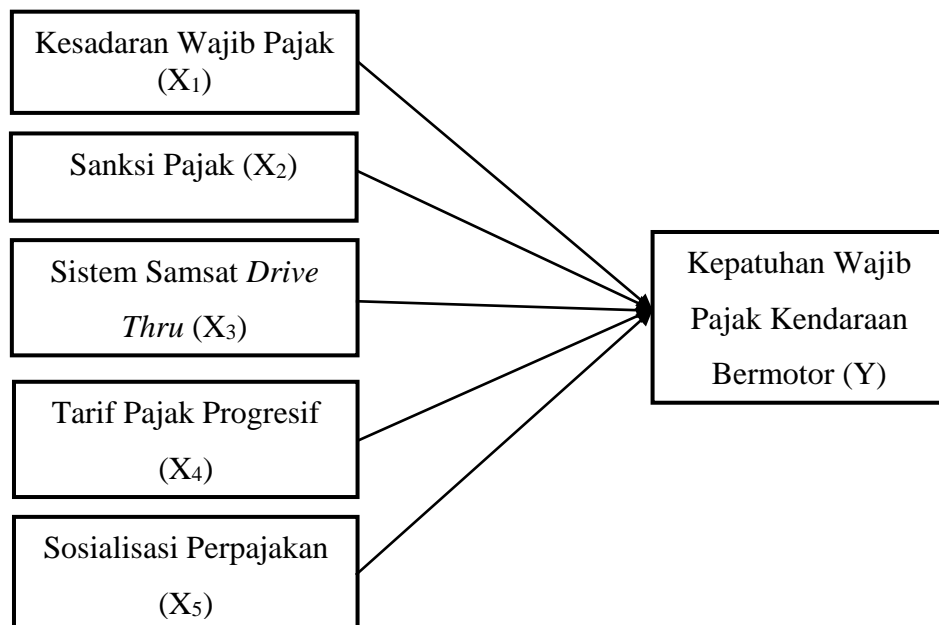
			kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikota magetan.
Yuli (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kediri)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak <p>Dependen:</p> <p>Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

Sumber: Berbagai Jurnal Diolah

Dari beberapa penelitian sebelumnya di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat hasil yang tidak konsisten dari setiap penelitian. Khususnya pada variabel kesadaran wajib, sanksi perpajakan, sistem *drive-thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan, oleh karena itu peneliti ingin meneliti variabel tersebut.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan Wajib Pajak tersebut menginfestasikan, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran pajak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan tidak terlambat dalam membayar pajak karena seorang wajib pajak sadar bahwa membayar pajak adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dan ikut serta dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak maka wajib pajak patuh dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya.

Menurut Wardani & Rumiayatun (2017) kesadaran wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak atas dasar hati

nuraninya yang tulus. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya dengan keikhlasan dan keikhlasan serta Wajib Pajak sadar pentingnya pajak bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan.

Pernyataan di atas diperkuat oleh hasil penelitian Priestnall et al. (2020), Ilhamsyah et al. (2016), Cahyadi & Jati (2016), Wardani & Rumiya (2017) dan Astina & Setiawan (2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan sanksi ini, setiap masyarakat yang melanggar peraturan perpajakan dikenakan sanksi agar wajib pajak selalu memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan. Setiap wajib pajak yang melanggar aturan dikenakan sanksi, sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Ilhamsyah et al. (2016) sanksi perpajakan menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dipatuhi oleh wajib pajak.

Mendukung penelitian Ilhamsyah et al. (2016), Cong & Agoes (2019), Efriyenty (2019), Cahyadi & Jati (2016) dan Juliantari et al. (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.3. Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem SAMSAT *drive thru* adalah sebuah layanan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa seorang wajib pajak tersebut harus turun dari kendaraannya. Adapun syarat untuk membayar pajak kendaraan bermotor cukup membawa STNK asli dan KTP asli, jadi tidak perlu di fotokopi. Sehingga banyak wajib pajak lebih memilih menggunakan layanan sistem *samsat drive thru* dari pada menggunakan layanan yang harus turun dari kendaraannya karena lebih banyak menghemat waktu, lebih simpel dalam melakukan pembayaran pajak tersebut, maka wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraannya.

Sistem SAMSAT *Drive Thru* adalah layanan pembayaran dan validasi pajak kendaraan bermotor yang berlokasi di luar gedung kantor SAMSAT, pemilik kendaraan bermotor bertransaksi untuk membayar pajak tanpa harus turun dari kendaraan bermotornya (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Semakin banyaknya pengguna sistem SAMSAT *drive thru* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Aditya, 2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) menyatakan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem SAMSAT *Drive Thru* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.4. Pengaruh Tarif Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tarif pajak progresif diberlakukan pada seorang yang mempunyai kendaraan mobil dengan jumlah lebih dari satu. Dengan ketentuan apabila kendaraan tersebut merupakan satu jenis dan menggunakan nama pribadi atau keluarga di alamat yang sama. Besar biaya pajak yang dibebankan berbeda antara kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Biaya tersebut meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan sejenisnya. Sehingga jika wajib menginvestigasi pemahaman tentang pajak progresif, maka wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraannya.

Menurut Wijayanti & Sukartha (2018) tingkat progresif dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif progresif ditetapkan oleh Pemerintah untuk diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan Objek Pajak. Dengan tarif progresif, maka semakin banyak wajib pajak mempunyai kendaraan, semakin banyak pajak yang harus mereka bayar.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Latrini & Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Tarif Pajak Progresif Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar menginvestigasi tentang masalah perpajakan, baik peraturan maupun tata cara pembayarannya. Sehingga wajib pajak selalu patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor jika sudah menginvestigasi peraturan dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut Wijayanti & Sukartha (2018) kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak, pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Cahyadi & Jati (2016), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang mendasarkan pada filsafah yang kemudian dipergunakan untuk populasi dan sampel yang diteliti. Pengumpulan data tersebut dengan menggunakan instrumen penelitian tertentu dan dalam menganalisis datanya bersifat statistik (Sugiyono, 2016).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran Ordinal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan dependen. Variabel independent yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wjaib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

3.2. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik sehingga peneliti ingin membuat opini berdasarkan statistik (Sugiyono, 2015). Populasi

dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor dan yang mempunyai kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo sebanyak 32.708 wajib pajak.

3.3. Sampel

Menurut Sugiyono (2015) sebagaimana dikutip oleh Astina & Setiawan (2018) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel, tetapi tidak menjadikan semua responden masuk ke dalam sampel, atau dengan kata lain pengambilan sampel tidak secara acak. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* (suka-suka) adalah pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia dengan cara mudah, sehingga serangkaian informasi dasar diperoleh dengan cepat dan efisien (Sudaryono, 2017) sebagaimana dikutip oleh Prasetyo & Arisudhana (2019).

Tidak semua kendaraan bermotor wajib diteliti karena jumlah kendaraan bermotor wajib sangat banyak, sehingga menentukan jumlah sampel menggunakan rumus. Menurut Husein, 2004:78 sebagaimana dikutip oleh Astina & Setiawan (2018) jumlah dan ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n= Jumlah sampel

N= Populasi

e= Batas toleransi error (10%)

Populasi penelitian ini berjumlah 32.708 wajib pajak, dengan persentase manfaat yang dipakai adalah 10%, dan hasil perhitungan tersebut dibulatkan untuk kepatuhan. Oleh karena itu, untuk menginvestigasi jumlah sampel penelitian, dilihat pada perhitungan di bawah ini:

$$n = \frac{32.708}{1 + 32.708 (10\%)^2}$$

$$n = 99,69 = \mathbf{100}$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka sampel dalam penelitian ini disesuaikan menjadi 100 orang dari seluruh wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor terdaftar di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Klasifikasi Variabel

Variabel merupakan suatu sifat ataupun nilai dari seseorang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen:

3.4.1.1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2012:33) sebagaimana dikutip oleh Astina & Setiawan (2018) variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan atau keterlambatan pembayaran pajak serta taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan pajaknya (Sapriadi, 2013) sebagaimana dikutip oleh Astina & Setiawan (2018).

3.4.1.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan keadaan pada variabel dependen dan berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

- a. Kesadaran Wajib Pajak (X₁)
- b. Pengetahuan Pajak (X₂)
- c. Sanksi Pajak (X₃)
- d. Tingkat Penghasilan (X₄)
- e. Pelayanan Fiskus (X₅)

3.4.2. Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah penjelasan definisi operasional untuk masing-masing variabel:

3.4.2.1. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Cahyadi & Jati (2016) kesadaran wajib pajak dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Idealnya, untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian perpajakan, masyarakat harus terus diajak untuk mengenal, mengakui, menghormati, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila jumlah kendaraan tersebut bertambah, tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, hal ini mengakibatkan tunggakan dan denda cukup tinggi. Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yang terdiri dari lima pernyataan. Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima indikator yaitu:

Tabel 3. 1.
Operasionalisasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kesadaran akan hak dan kewajiban pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak	Skala Ordinal
2	Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pendanaan negara dan daerah	Skala Ordinal
3	Motivasi diri untuk membayar pajak secara sukarela	Skala Ordinal

3.4.2.2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak diberikan bagi masyarakat yang melanggar peraturan ditetapkan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan dan/atau kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan (tax law), dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar oleh wajib pajak, maka diperlukan sanksi (Efriyenty, 2019). Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Wardani & Asis (2017) terdiri dari lima pernyataan. Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan kuesioner terdiri dari dua indikator yaitu:

Tabel 3. 2.
Operasionalisasi Variabel Sanksi Pajak

No	Indikator	Skala Pengukuran
1	Wajib pajak menginvestigasi tujuan dari sanksi pajak kendaraan	Skala Ordinal
2	Pengenaan denda yang cukup besar merupakan salah satu cara mendidik wajib pajak	Skala Ordinal

3.4.2.3. Sistem SAMSAT *Drive Thru*

Menurut Wardani & Rumiyyatun (2017) sistem SAMSAT *drive thru* adalah suatu sistem prosedur membayar pajak atau memperpanjang STNK dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini, pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya, tetapi pengemudi hanya memberikan data STNK lamanya di loket yang dijangkau. Selain itu, setelah melakukan pembayaran, masyarakat hanya perlu membawa bukti bahwa mereka telah membayar pajak kendaraan dan bukti perpanjangan STNK. Sistem SAMSAT *drive thru* merupakan sistem SAMSAT yang lebih terkontrol, sederhana, menghemat waktu, meningkatkan

wajib pajak, kualitas layanan dan lokasi wilayah. Variabel sistem SAMSAT *drive thru* dengan menggunakan kuesioner terdiri dari lima indikator yaitu:

Tabel 3. 3.
Operasionalisasi Variabel Sistem Samsat *Drive Thru*

No	Indikator	Skala Pengukuran
1	SAMSAT <i>Drive Thru</i> bisa lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bemotor	Skala Ordinal
2	Wajib pajak dengan mudah membayar pajak menggunakan sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	Skala Ordinal
3	Kepentingan wajib pajak semakin meningkat	Skala Ordinal
4	Penghematan waktu	Skala Ordinal
5	Kualitas pelayanan	Skala Ordinal

3.2.2.4. Tarif Pajak Progresif

Menurut Wijayanti & Sukartha (2018) tarif progresif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif progresif ditetapkan oleh Pemerintah untuk ditetapkan kepada Wajib Pajak berdasarkan Objek Pajaknya. Tarif pajak progresif merupakan tarif yang di kenakan semakin besar apabila ada ketentuan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Variabel tarif pajak progresif diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima indikator yaitu:

Tabel 3. 4.
Operasionalisasi Variabel Tarif Pajak Progresif

No	Indikator	Skala Pengukuran
1	Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan tarif pajak daerah	Skala Ordinal
2	Besarnya pajak yang akan di bayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif PKB	Skala Ordinal
3	Tarif pajak progresif sesuai dengan peraturan daerah	Skala Ordinal
4	Dengan adanya tarif pajak progresif diharapkan meningkatkan pendapatan daerah	Skala Ordinal
5	Saya sudah menginvestigasi tentang peneanan tarif pajak progresif	Skala Ordinal

3.2.2.5.Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Setelah sosialisasi perpajakan diadakan maka seharusnya masyarakat atau wajib pajak lebih patuh untuk membayarkan pajaknya.

Menurut Juliantari et al. (2021) sosialisasi pajak adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya, dan wajib pajak pada khususnya, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari lima indikator yaitu:

Tabel 3. 5.
Operasionalisasi Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Indikator	Skala Pengukuran
1	Penyuluhan	Skala Ordinal
2	Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat	Skala Ordinal
3	Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak	Skala Ordinal
4	Pemasangan <i>billboard</i> atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat	Skala Ordinal
5	<i>Web site</i> Ditjen pajak	Skala Ordinal

3.2.2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Efriyenty (2019) kepatuhan wajib pajak meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan berlaku, membayar pajak tepat waktu, wajib pajak yang memenuhi syarat untuk membayar pajak, dan wajib pajak yang menginvestigasi tanggal jatuh tempo pembayaran. Variabel diukur dengan menggunakan kuesioner yang pernah digunakan oleh Wardani & Asis (2017) terdiri dari lima pernyataan. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan kuesioner terdiri dari lima indikator yaitu:

Tabel 3. 6.
Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skala Pengukuran
1	Memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku	Skala Ordinal
2	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak	Skala Ordinal
3	Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan	Skala Ordinal
4	Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak	Skala Ordinal
5	Wajib pajak menginvestigasi waktu jatuh tempo pembayaran pajaknya	Skala Ordinal

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan dan pengelolaan data penelitian dilakukan pada bulan Februari 2022. Lokasi pengambilan data berada di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.6. Prosedur Pengambilan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* (suka-suka) adalah pengumpulan informasi dari anggota populasi yang tersedia dengan cara mudah, sehingga serangkaian informasi dasar diperoleh dengan cepat dan efisien (Sudaryono, 2017) sebagaimana dikutip oleh Prasetyo & Arisudhana (2019). Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara menyebar kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Prosedur pengambilan data dilakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner atau angket adalah teknik dengan mengajukan pernyataan untuk dipilih oleh responden dengan menyesuaikan keadaan responden, biasanya secara tertulis. Rencana yang menjadi responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor dan yang mempunyai kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

3.7. Uji Instrumen Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, maka diperlukan uji instrumen data untuk menginvestigasi keabsahan kuesioner dan keseriusan responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga hasil

penelitian ini dipertanggungjawabkan. Uji instrumen terdiri dari dua uji yaitu uji validitas, dan uji reliabilitas.

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode pearson correlation, yang menyatakan data itu valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruknya signifikan dibawah 0,05 (Ghozali, 2018).

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban konsisten dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini menggunakan cara kedua atau teknik *Cronbach* alpha, suatu instrumen dikatakan handal (reliabel) bila mempunyai *cronbach* alpha $> 0,7$ (Ghozali, 2018).

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran data yaitu nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi, diperoleh dari tanggapan yang diterima dari responden (Ghozali, 2018).

3.9. Uji Normalitas

Uji normalitas bermanfaat untuk menguji apakah data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Metode yang digunakan adalah dengan melihat distribusi normal dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (KS). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) berdistribusi mendekati normal atau normal sekali (Ghozali, 2016).

- a. Jika nilai signifikansi (sig) $> 0,05$, sebaran data dinyatakan normal.
- b. Jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$, sebaran data dinyatakan tidak normal.

Pada uji normalitas ini, peneliti menggunakan level signifikansi 0,05 atau 5% karena peneliti mempunyai pandangan bahwa data tersebut mempunyai kesalahan yang kecil.

3.10. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis mempunyai kaitan dengan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada penelitian ini, pengujian hipotesis yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

3.10.1. Uji Analisis Linear Berganda

Pengujian ini bertujuan untuk menyatakan arah hubungan variabel terikat dengan variabel bebas (Ghozali, 2018). Jika probabilitas signifikansi 0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan jika signifikansi 0,05 maka hipotesis alternatif ditolak, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : konstanta

β : koefisien regresi

X₁: Kesadaran Wajib Pajak

X₂: Sanksi Pajak

X₃: Sistem SAMSAT *Drive Thru*

X₄: Tarif Pajak Progresif

X₅: Sosialisasi Perpajakan

β_1 : Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak

β_2 : Koefisien Regresi Sanksi Pajak

β_3 : Koefisien Regresi Sistem SAMSAT *Drive Thru*

β_4 : Koefisien Regresi Tarif Pajak Progresif

β_5 : Koefisien Regresi Sosialisasi Perpajakan

3.10.2. Uji Kelayakan Model (uji F)

Uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menguji apakah persamaan regresi dalam penelitian ini dalam kondisi *goodness of fit* atau layak (fit) untuk diinterpretasikan (Ghozali, 2016). Uji F menggunakan level of significant 0,05% atau 5%. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 5% maka modal regresi digunakan untuk memprediksi (Ghozali, 2016).

3.10.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah koefisien yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (variabel dependen). Nilai dari uji ini mencerminkan besarnya variasi dari variabel dependen Y dijelaskan oleh variabel independen X. nilai koefisien determinasi yang kecil mempunyai arti bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2018). Apabila nilai koefisien determinasi= 0, maka artinya variabel X tidak menjelaskan variabel Y sama sekali, tetapi jika koefisien determinasi= 1, variabel Y dijelaskan oleh variabel X dan semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

3.10.4. Uji t

Uji t berfungsi untuk menginvestigasi pengaruh masing-masing variabel independent terhadap dependen. Menurut Ghozali (2018) pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha= 5\%$) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. $\leq 0,05$, maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai sig. $\geq 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Instrumen Data

4.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode pearson correlation, yang menyatakan data itu valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruknya signifikan dibawah 0,05 (Ghozali, 2018). Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil uji keenam variabel yang dilakukan dalam penelitian ini,yaitu kesadaran wajib pajak (KWP), sanksi pajak (SP), sistem SAMSAT *drive thru* (SSDT), tarif pajak progresif (TPP), sosialisasi perpajakan (SOSP), dan kepatuhan wajib pajak (KTWP).

Tabel 4. 1.
Hasil Uji Instrumen Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	KWP 1	0,000	Valid
	KWP 2	0,000	Valid
	KWP 3	0,000	Valid
	KWP 4	0,000	Valid
	KWP 5	0,000	Valid
Sanksi Pajak	SP 1	0,000	Valid
	SP 2	0,000	Valid
	SP 3	0,000	Valid
	SP 4	0,000	Valid
	SP 5	0,000	Valid
Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	SSDT 1	0,000	Valid
	SSDT 2	0,026	Valid
	SSDT 3	0,000	Valid
	SSDT 4	0,000	Valid
	SSDT 5	0,000	Valid
Tarif Pajak Progresif	TPP 1	0,000	Valid
	TPP 2	0,000	Valid
	TPP 3	0,000	Valid
	TPP 4	0,000	Valid
	TPP 5	0,000	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SOP 1	0,000	Valid
	SOP 2	0,000	Valid
	SOP 3	0,000	Valid
	SOP 4	0,000	Valid
	SOP 5	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KTWP 1	0,000	Valid
	KTWP 2	0,000	Valid
	KTWP 3	0,000	Valid
	KTWP 4	0,000	Valid
	KTWP 5	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, sosialisasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak mempunyai kriteria valid untuk setiap butir elemen pelaporan dengan signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa

semua elemen pernyataan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pada penelitian ini menggunakan cara kedua atau teknik teknik *Cronbach* alpha, suatu instrument dikatakan handal (reliabel), bila mempunyai *cronbach* alpha $> 0,7$ (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini menggunakan cara kedua yaitu teknik *Cronbach* alpha yang menyatakan jika nilai koefisien $> 0,7$ maka pernyataan dalam penelitian tersebut dapat dikatakan handal (reliabel). Jika sebaliknya nilai koefisien $< 0,7$ dikatakan tidak handal (tidak reliabel). Pada Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (KWP), sanksi pajak (SP), sistem SAMSAT *drive thru* (SSDT), tarif pajak progresif (TPP), sosialisasi perpajakan (SOSP), dan kepatuhan wajib pajak (KTWP).

Tabel 4. 2.
Hasil Uji Instrumen Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,815	<i>Reliable</i>
Sanksi Pajak	0,800	<i>Reliable</i>
Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	0,797	<i>Reliable</i>
Tarif Pajak Progresif	0,825	<i>Reliable</i>
Sosialisasi Perpajakan	0,818	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,821	<i>Reliable</i>

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa *Cronbach's Alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,815, sanksi pajak sebesar 0,800, sistem SAMSAT *drive thru* sebesar 0,797, tarif pajak progresif sebesar 0,825, sosialisasi perpajakan sebesar 0,818, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,821. Uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel adalah $> 0,7$ yang berarti jawaban dari setiap responden adalah reliabel, sehingga kuesioner untuk masing-masing variabel digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.2. Data Penelitian

4.2.1. Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor Kapanewon Sentolo yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan jumlah sampel yang sudah dihitung menggunakan rumus solvin yaitu sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kuesioner yang disebar sebanyak 114 kuesioner, dari jumlah kuesioner yang disebar ada 110 kuesioner yang kembali. Berikut ini adalah rinciannya: Pada Tabel 4.3 menunjukkan rincian penyebaran hasil kuesioner.

Tabel 4. 3.
Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Kuesioner disebar	114	100
Kuesioner kembali	114	100
Kuesioner tidak dapat diolah	4	3,51
Kuesioner dapat diolah	110	96,49

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 disimpulkan bahwa terdapat kuesioner yang kembali sebanyak 100% dan data yang dapat diolah sebesar 96,49% atau 110 wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

4.2.2. Distribusi Frekuensi Variabel

4.2.2.1. Kesadaran Wajib Pajak

Pada Tabel 4.4 menjelaskan tentang frekuensi jawaban responden variabel kesadaran wajib pajak yaitu antara lain:

Tabel 4. 4.
Frekuensi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	Kesadaran Wajib Pajak				Total
	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	
1	0	2,7	55,5	41,8	100%
2	3,6	10,9	56,4	29,1	100%
3	0	6,4	53,6	40,0	100%
4	0	3,6	55,5	40,9	100%
5	0	3,6	61,8	34,5	100%
Rata-rata	0,72	5,44	56,56	37,26	100%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab sanksi pajak yaitu sangat tidak setuju sebesar 0,72%, tidak setuju sebesar 5,44%, setuju sebesar 56,56%, dan sangat setuju sebesar 37,26%. Dengan rata-rata

responden memilih opsi jawaban setuju dengan angka 56,56%, yang berarti penilaian terhadap variabel sudah baik.

4.2.2.2.Sanksi Pajak

Pada Tabel 4.5 menjelaskan tentang frekuensi jawaban responden variabel sanksi pajak yaitu antara lain:

Tabel 4. 5.
Frekuensi Jawaban Sanksi Pajak

Pernyataan	Sanksi Pajak				Total
	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	
1	0	2,7	53,6	43,6	100%
2	3,6	14,5	48,2	33,6	100%
3	0	8,2	51,8	40,0	100%
4	0	5,5	59,1	35,5	100%
5	0	9,1	65,5	25,5	100%
Rata-rata	0,72	8,0	55,64	35,64	100%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab sanksi pajak yaitu sangat tidak setuju sebesar 0,72%, tidak setuju sebesar 8,0%, setuju sebesar 55,64%, dan sangat setuju sebesar 35,64%. Dengan rata-rata responden memilih opsi jawaban setuju dengan angka 55,64%, yang berarti penilaian terhadap variabel sudah baik.

4.2.2.3.Sistem SAMSAT *Drive Thru*

Pada tabel 4.6 menjelaskan tentang frekuensi jawaban responden variabel sistem SAMSAT *drive thru*, yaitu antara lain:

Tabel 4. 6.
Frekuensi Jawaban Sistem Samsat *Drive Thru*

Pernyataan	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>				Total
	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	
1	0	10,0	63,6	26,4	100%
2	0	71,8	22,7	5,5	100%
3	0	9,1	69,1	21,8	100%
4	0	3,6	63,6	32,7	100%
5	0,9	5,5	67,3	26,4	100%
Rata-rata	0,18	20,0	57,26	22,56	100%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab sistem SAMSAT *drive thru* yaitu sangat tidak setuju sebesar 0,18%, tidak setuju sebesar 20,0%, setuju sebesar 57,26%, dan sangat setuju sebesar 22,56%. Dengan rata-rata responden memilih opsi jawaban setuju dengan angka 57,26%, yang berarti penilaian terhadap variabel sudah baik.

4.2.2.4. Tarif Pajak Progresif

Pada Tabel 4.7 menjelaskan tentang frekuensi jawaban responden variabel tarif pajak progresif, yaitu antara lain:

Tabel 4. 7.
Frekuensi Jawaban Tarif Pajak Progresif

Pernyataan	Tarif Pajak Progresif				Total
	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	
1	0	7,3	68,2	24,5	100%
2	0	7,3	70,9	21,8	100%
3	0,9	5,5	71,8	21,8	100%
4	0,9	3,6	72,7	22,7	100%
5	0,9	26,4	57,3	15,5	100%
Rata-rata	0,54	10,02	68,18	21,26	100%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab tarif pajak progresif yaitu sangat tidak setuju sebesar 0,54%, tidak setuju sebesar

10,02%, setuju sebesar 68,18%, dan sangat setuju sebesar 21,26%. Dengan rata-rata responden memilih opsi jawaban setuju dengan angka 68,18%, yang berarti penilaian terhadap variabel sudah baik

4.2.2.5.Sosialisasi Perpajakan

Pada Tabel 4.8 menjelaskan tentang frekuensi jawaban responden variabel sosialisasi perpajakan, yaitu antara lain:

Tabel 4. 8.
Frekuensi Jawaban Sosialisasi Perpajakan

Pernyataan	Sosialisasi Perpajakan				Total
	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	
1	1,8	11,8	58,2	28,2	100%
2	10,9	37,3	35,5	16,4	100%
3	0,9	4,5	70,0	24,5	100%
4	1,8	2,7	65,5	30,0	100%
5	3,6	11,8	54,5	30,0	100%
Rata-rata	3,8	13,62	56,74	25,82	100%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab sosialisasi perpajakan yaitu sangat tidak setuju sebesar 3,8%, tidak setuju sebesar 13,62%, setuju sebesar 56,74%, dan sangat setuju sebesar 25,82%. Dengan rata-rata responden memilih opsi jawaban setuju dengan angka 56,74%, yang berarti penilaian terhadap variabel sudah baik.

4.2.2.6.Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Tabel 4.9 menjelaskan tentang frekuensi jawaban responden variabel kepatuhan wajib pajak, yaitu antara lain:

Tabel 4. 9.
Frekuensi Jawaban Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Kepatuhan Wajib Pajak				Total
	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	
1	0,9	0	71,8	27,3	100%
2	1,8	8,2	58,2	31,8	100%
3	1,8	11,8	59,1	27,3	100%
4	1,8	8,2	56,4	33,6	100%
5	0,9	0,9	57,3	40,9	100%
Rata-rata	1,44	8,18	60,56	32,18	100%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan rata-rata responden dalam menjawab kepatuhan wajib pajak yaitu sangat tidak setuju sebesar 1,44%, tidak setuju sebesar 8,18%, setuju sebesar 60,56%, dan sangat setuju sebesar 32,18%. Dengan rata-rata responden memilih opsi jawaban setuju dengan angka 60,56%, yang berarti penilaian terhadap variabel sudah baik.

4.3. Demografi Responden Penelitian

Berdasarkan kuesioner yang diperoleh dari responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo. Berikut ini adalah deskripsi jenis kelamin dan usia dari identitas responden survei. Tabel 4.10 menunjukkan data demografi responden wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 4. 10.
Demografi Responden

Deskriptif	Keterangan	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	77	70%
	Perempuan	33	30%
Usia	<25 tahun	30	27,28%
	25-35 tahun	26	23,63%
	36-45 tahun	21	19,09%
	46-55 tahun	22	20%
	>55 tahun	11	10%

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa sebagian responden berjenis kelamin laki-laki mempunyai proporsi lebih banyak yaitu sebanyak 77 orang (70%) dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak 33 orang (33%).

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 30 orang, responden yang berusia antara 25-35 tahun berjumlah 26 orang, responden yang berusia antara 36-45 tahun berjumlah 21 orang, responden yang berusia antara 46-55 tahun berjumlah 22 orang, dan responden yang berusia lebih dari 55 tahun berjumlah 11 orang.

4.4. Analisis dan Hasil Pembahasan

4.4.2. Hasil Statistik Deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran data yaitu nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi, diperoleh dari tanggapan yang diterima dari responden (Ghozali, 2018). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (KWP), sanksi perpajakan (SP), *drive thru* system (SSDT), tarif pajak progresif (TPP), sosialisasi perpajakan (SOSP), dan kepatuhan wajib pajak (KTWP). Tabel 4.11 menunjukkan hasil statistickdeskriptif.

Tabel 4. 11.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	2,40	4,00	3,4255	,36459
Sanksi Pajak	110	2,00	4,00	3,2618	,46353
Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	110	2,00	4,00	3,0218	,38250
Tarif Pajak Progresif	110	2,00	4,00	3,1018	,46590
Sosialisasi Perpajakan	110	1,00	4,00	3,0455	,55167
Kepatuhan Wajib Pajak	110	1,00	4,00	3,2345	,52312
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Data primer diolah (2022)

Hasil statistik deskriptif yang telah dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 25 adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak sebanyak 110 sampel. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai rata-rata 3,42 dengan nilai minimal 2,40 dan nilai maksimal 4,00. Nilai standar deviasi adalah 0,36, nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Rata-rata kesadaran wajib pajak sebesar 3,42 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, sehingga pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak sangat baik.

2. Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak sebanyak 110 sampel. Sanksi pajak mempunyai nilai mean 3,26 dengan nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,46, nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, yang berarti penyebaran data baik atau penyimpangan

rendah. Rata-rata sanksi pajak sebesar 3,46 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, maka pemahaman responden wajib pajak atas sanksi perpajakan sangat baik.

3. Sistem SAMSAT *Drive Thru*

Variabel sistem SAMSAT *drive thru* sebanyak 110 sampel. Sistem SAMSAT *drive thru* mempunyai nilai mean 3,02 dengan nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,38, nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang berarti penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Rata-rata sistem samsat *drive thru* sebesar 3,42 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, maka pemahaman responden wajib pajak terkait dengan sistem SAMSAT *drive thru* sangat baik.

4. Tarif Pajak Progresif

Variabel tarif pajak progresif sebanyak 110 sampel. Tarif pajak progresif mempunyai nilai mean 3,10 dengan nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,46, nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Rata-rata tarif pajak progresif sebesar 3,10 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, maka pemahaman responden wajib pajak terkait dengan tarif pajak progresif sangat baik.

5. Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan sebanyak 110 sampel. Sosialisasi perpajakan mempunyai nilai mean 3,04 dengan nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,55, nilai deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Rata-rata sosialisasi perpajakan sebesar 3,04 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, maka pemahaman responden wajib pajak terkait dengan sosialisasi itu sudah sangat baik.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak sebanyak 110 sampel. Kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai mean 3,23 dengan nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum 4,00. Nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,52, standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang artinya penyebaran data baik atau penyimpangan rendah. Rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 3,23 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, maka pemahaman responden wajib pajak itu sangat baik.

4.4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bermanfaat untuk menguji apakah data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Metode yang digunakan adalah dengan melihat distribusi normal dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (KS). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas (X)

dan data variabel terikat (Y) berdistribusi mendekati normal atau normal sekali (Ghozali, 2016).

- a. Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05, sebarannya dinyatakan normal.
- b. Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05, sebarannya dinyatakan tidak normal.

Pada uji normalitas ini, peneliti menggunakan level signifikansi 0,05 atau 5% karena peneliti mempunyai pandangan bahwa data tersebut mempunyai kesalahan yang kecil. Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji normalitas.

Tabel 4. 12.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,61581486
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,057
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas diketahui bahwa hasil uji normalitas sebesar 0,200. Uji normalitas tersebut menyatakan bahwa model analisis regresi sudah memenuhi asumsi normalitas disebabkan oleh tingkat signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga data yang akan diolah dikatakan baik karena berdistribusi normal atau mendekati normal.

4.4.4. Hasil Uji Hipotesis

4.4.4.1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini digunakan untuk menginvestigasi persamaan apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Tabel 4.13 menunjukkan hasil persamaan Uji Analisis Regresi Linear Berganda.

Tabel 4. 13.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,363	1,445		-,251	,802
	Kesadaran Wajib Pajak	,261	,103	,223	2,531	,013
	Sanksi Pajak	,232	,103	,205	2,248	,027
	Sistem SAMSAT Drive Thru	,043	,110	,030	,387	,700
	Tarif Pajak Progresif	,153	,097	,137	1,583	,117
	Sosialisasi Perpajakan	,356	,073	,376	4,896	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = -0,363 + 0,261 X_1 + 0,232 X_2 + 0,043 X_3 + 0,153 X_4 + 0,356 X_5$$

4.4.4.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah persamaan regresi dalam penelitian ini dalam kondisi *goodness of fit* atau layak (fit) untuk diinterpretasikan (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% atau dengan nilai (α) = 0,05. Bisa dikatakan mempunyai model yang sangat fit

jika mempunyai signifikansi $F < 0,05$ dengan alat ukur uji ANOVA (Ghozali, 2016).

Tabel 4.14 menunjukkan hasil uji kelayakan model (Uji F):

Tabel 4. 14.
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	461,135	5	92,227	33,704	,000 ^b
	Residual	284,583	104	2,736		
	Total	745,718	109			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem SAMSAT *Drive Thru*, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak

Sumber: Data primer diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas diketahui bahwa pengujian uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya $< 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa model penelitian ini sudah fit dan siap untuk melakukan pengujian hipotesis.

4.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (variabel dependen). Nilai dari uji ini mencerminkan besarnya variasi dari variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X. nilai koefisien determinasi yang kecil mempunyai arti bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2018). Apabila nilai koefisien determinasi= 0, artinya variabel X tidak dapat menjelaskan variabel Y sama sekali, tetapi jika koefisien determinasi= 1, variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X dan semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Tabel 4. 15.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,618	,600	1,65420

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem SAMSAT *Drive Thru*, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah (2022)

Koefisien determinasi pada Tabel 4.15 di atas yang berada di dalam kolom *Adjusted R Square* sebesar 0,600 yang artinya bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sistem SAMSAT *drive thru*, tarif pajak progresif, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 60% dan sebesar 40% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

4.4.4.4.Uji (t)

Uji t bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh masing-masing variabel independent terhadap pedenden. Menurut (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig. $\leq 0,05$, maka terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai sig. $\geq 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4. 16.
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,363	1,445		-,251	,802
	Kesadaran Wajib Pajak	,261	,103	,223	2,531	,013
	Sanksi Pajak	,232	,103	,205	2,248	,027
	Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i>	,043	,110	,030	,387	,700
	Tarif Pajak Progresif	,153	,097	,137	1,583	,117
	Sosialisasi Perpajakan	,356	,073	,376	4,896	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah (2022)

Hasil uji statistik (Uji t) yang telah dilakukan dengan bantuan IBM SPSS 25 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t pada Table 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) 0,013. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis pertama (X_1) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.
2. Berdasarkan hasil uji t pada Table 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel sanksi pajak (X_2) 0,027. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis kedua (X_2) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

3. Berdasarkan hasil uji t pada Table 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel sistem samsat *drive thru* (X_3) 0,700. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis ketiga (X_3) yang menyatakan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.
4. Berdasarkan hasil uji t pada Table 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel tarif pajak progresif (X_4) 0,117. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis keempat (X_4) yang menyatakan bahwa tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.
5. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel sosialisasi perpajakan (X_5) 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian hipotesis kelima (X_5) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan perhitungan dengan uji analisis linear berganda bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) mempunyai nilai signifikansi 0,013, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kapanewon Sentolo yang sudah terdaftar di SAMSAT Kulon Progo sadar dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor dan paham pentingnya membayar pajak guna untuk kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan sebagian responden mempunyai kesadaran pajak yang sangat baik atau setuju untuk patuh dalam membayar pajak dan hasil tersebut menunjukkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak di SAMSAT Kulon Progo.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak menginvestigasi, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran pajak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan. Pajak sebagai pendapatan daerah, terdapat kesadaran dalam diri seorang wajib pajak, seorang wajib pajak membayar pajak dengan caranya sendiri pada waktu yang tepat dan segera membayar pajak karena seorang wajib pajak sadar bahwa membayar pajak

merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. dan ikut serta dalam pembelaan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak maka wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan, namun sebaliknya jika wajib pajak tidak sadar bahwa dirinya sedang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tidak menghormati pembayaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah et al. (2016), Cahyadi & Jati (2016), Wardani & Asis (2017) dan Astina & Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sejalan dengan penelitian ini.

4.5.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Hasil penelitian tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan perhitungan dengan uji analisis linear berganda menyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X_2) mempunyai nilai signifikansi 0,027, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Responden wajib pajak menginvestigasi adanya sanksi pajak yang diterapkan pada SAMSAT Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak diperlukan untuk menghukum setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah seorang wajib pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap wajib pajak yang melanggar aturan dikenakan sanksi, sehingga

wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun di sisi lain, seorang wajib pajak meremehkan sanksi perpajakan yang berlaku, banyak juga wajib pajak tidak disiplin atau menunda-nunda dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga hal ini membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2015-2019 jumlah wajib pajak menunggak selalu meningkat. Hal ini menunjukkan masih banyak wajib pajak melakukan pelanggaran pajak apabila sanksi pajak yang diperoleh rendah. Akan tetapi berdasarkan jawaban dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner, responden berpendapat wajib pajak kapanewon sentolo mempunyai pemahaman yang baik dan setuju tentang sanksi pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et al. (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sejalan dengan penelitian ini.

4.5.3. Pengaruh Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian tentang sistem SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan perhitungan dengan uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel sistem SAMSAT *drive thru* (X_3) mempunyai nilai signifikansi 0,700, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa masih banyak responden wajib pajak belum menginvestigasi sistem SAMSAT *drive thru* yang diberlakukan di

SAMSAT Kabupaten Kulon Progo. Selain itu wajib pajak masih merasakan kesulitan dengan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem SAMSAT *drive thru* dan juga dengan membayar pajak kendaraan bermotor dengan SAMSAT *drive thru* masih dirasakan belum dapat menghemat waktu bagi wajib pajak.

Sistem *samsat drive thru* merupakan sebuah pelayanan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tanpa seorang wajib pajak tersebut harus turun dari kendaraannya. Adapun syarat untuk membayar pajak kendaraan bermotor cukup membawa STNK asli dan KTP asli, jadi tidak perlu fotokopi. Sehingga banyak wajib pajak lebih memilih menggunakan layanan sistem SAMSAT *drive thru* dari pada menggunakan layanan yang harus turun dari motor karena lebih banyak menghemat waktu, lebih simpel dalam melakukan pembayaran pajak tersebut.

Pada penelitian ini sistem SAMSAT *drive thru* tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak berpengaruhnya sistem SAMSAT *drive thru* dalam penelitian ini disebabkan oleh adanya beberapa hal, salah satunya yaitu disebabkan oleh letak lokasi SAMSAT *drive thru* yang kurang strategis sehingga wajib pajak masih merasa kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu juga disebabkan oleh terdapatnya beberapa pilihan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga seorang wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Selain itu dilihat dari responden yang menjawab pernyataan kuesioner, masih ada beberapa responden menjawab bahwa sistem SAMSAT *drive thru* sulit dilakukan, tidak menghemat waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puteri et al. (2019) yang menyatakan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sejalan dengan penelitian ini.

4.5.4. Pengaruh Tarif Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan perhitungan dengan analisis regresi linear berganda menyatakan bahwa variabel tarif pajak progresif (X_4) mempunyai nilai signifikansi 0,117, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya responden wajib pajak menjawab tidak menginvestigasi tentang tarif pajak kendaraan bermotor, melainkan seorang wajib hanya membayar pajak langsung tanpa menginvestigasi tarif pajak progresif yang berlaku di SAMSAT Kulon Progo. Oleh karena itu, masih kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan tarif pajak progresif, dan responden kebanyakan sudah berusia tua.

Tarif pajak progresif diberlakukan pada seseorang yang mempunyai kendaraan mobil dengan jumlah lebih dari satu. Dengan ketentuan apabila kendaraan tersebut merupakan satu jenis dan menggunakan nama pribadi atau keluarga di alamat yang sama. Besar biaya pajak yang dibebankan berbeda antara kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Biaya tersebut meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan sejenisnya. Kemudian pajak progresif memberi tahu wajib pajak berapa pajak yang dibayarkan, sehingga wajib pajak patuh dalam

membayar pajak atas sepeda motornya. Begitupun sebaliknya jika seorang wajib pajak tidak menginvestigasi adanya tarif pajak progresif maka ketidak patuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor terjadi dalam diri seorang wajib pajak, karena tarif pajak progresif bukan sebagai faktor yang dipertimbangkan oleh seorang wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya.

Hasil penelitian dilakukan oleh Apriliyani et al. (2020) yang menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sejalan dengan penelitian ini.

4.5.5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis linear berganda menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X_5) mempunyai nilai signifikansi 0,000 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa responden di Kapanewon Sentolo sudah terdaftar di SAMSAT Kulon Progo rata-rata sudah banyak mengikuti sosialisasi perpajakan, yang diadakan oleh SAMSAT atau dari masing masing kapanewon ataupun tingkat desa, jadi seorang wajib pajak sudah menyadari pentingnya dalam memnbayar pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya harus dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar

menginvestigasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara pembayarannya. Dengan demikian wajib pajak selalu patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya jika sudah menginvestigasi penaturan dan tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, semakin wajib pajak menginvestigasi pemahaman tentang sosialisasi pajak maka semakin patuh seorang wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, begitu juga sebaliknya jika seorang wajib pajak tidak menginvestigasi pengertian sosialisasi pajak maka wajib pajak tidak patuh dalam membayar. pajak kendaraan.

Hasil penelitian dilakukan oleh Cahyadi & Jati (2016) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sejalan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil pembahasan di atas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor studi pada wajib pajak kapanewon sentolo terdaftar pada SAMSAT Kulon Progo dengan variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu kesadaran wajib pajak (KWP), sanksi pajak (SP), sistem SAMSAT drive thru (SSDT), tarif pajak progresif (TPP), sosialisasi perpajakan (SOSP), dan kepatuhan wajib pajak (KTWP), maka ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sistem SAMSAT *drive thru* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Tarif pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5.2. Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang dialami selama penelitian yaitu antara lain:

1. Pada saat mengisi angket kuesioner, peneliti hanya bisa mendampingi beberapa responden saja. Dengan demikian, terdapat beberapa kuesioner tidak dapat diolah karena responden kurang paham terkait dengan pernyataan yang ada dalam kuesioner.
2. Masih banyak responden dalam melakukan pengisian kuesioner tidak sesuai dengan keadaan yang dialaminya.
3. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tarif pajak progresif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan semua jenis kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun beroda empat sehingga hasil penelitian kurang maksimal.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan saran sebagai berikut, yaitu antara lain:

1. Sebelum responden wajib pajak mengisi kuesioner diharapkan peneliti menjelaskan per butir item pernyataan kuesioner kepada responden wajib pajak, maka dari itu data yang diperoleh akan lebih handal dan layak untuk di olah.
2. Selain itu dalam melakukan penyebaran angket kuesioner dilakukan secara langsung, dan dengan melakukan wawancara diperolehnya hasil jawaban responden yang paling lengkap.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel bebas lainnya, misalnya tingkat penghasilan, sanksi administrasi, akuntabilitas pelayanan dan lainnya. Sehingga peneliti selanjutnya dapat memberikan hasil penelitian yang sangat lebih komprehensif dan sangat bermanfaat.
4. Untuk peneliti seharusnya diharapkan jika menggunakan variabel tarif pajak progresif maka populasi digunakan hanya wajib pajak yang mempunyai kendaraan beroda empat saja. Sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. G. S. dkk. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Apriliyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 9.
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23.
- Awaloedin Indriyanto dkk. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Volume 5.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2).
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit UNDIP.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh

Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak TentangS Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8.

Juliantari, N. A. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ginyar. *Jurnal Kharisma*, 3.

Latrini, M. Y., & Gayatri, G. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia* (Revi, Andi).

Maulida, R. (2018). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>

Mekari. (2018). *Serba-Serbi Pajak Daerah: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Kriteria*. Klikpajak.Id.

Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7.

Priestnall, S. L., Okumbe, N., Orenge, L., Okoth, R., Gupta, S., Gupta, N. N., Gupta, N. N., Hidrobo, M., Kumar, N., Palermo, T., Peterman, A., Roy, S., Konig, M. F., Powell, M., Staedtke, V., Bai, R. Y., Thomas, D. L., Fischer, N., Huq, S., ... Chatterjee, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30. n

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1.\

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (22nd ed.). Penerbit Alfabeta Bandung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

- Syah, A. langgeng N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, Vol 2.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1. pdf
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5.
- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25.
- Yuli, L. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, Volume 6.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Email : feb@upnyk.ac.id - Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Nomor : 6 /UN62.14/AKD.5/II/2022 Yogyakarta, 21 Februari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Observasi/Pra Survei

Yth.

Kepala SAMSAT Kabupaten Gunung Kidul

Jl. Pemuda, Rejosari, Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul DIY 55851

Di

Yogyakarta.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas mata kuliah, *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta.

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan ijin kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami, untuk melakukan Observasi/prasurvei di **Kantor SAMSAT Kabupaten Gunungkidul** adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Yola Arinda Nastiti**
No. Mahasiswa : 142180038
No. Telpon/HP : 085601452032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DR. Sri Suharsih, M.Si
NIPPPK: 196912192021212008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Email : feb@upnyk.ac.id - Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Nomor : 60 /UN62.14/AKD.5/II/2022 Yogyakarta, 21 Februari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Observasi/Pra Survei

Yth.
Kepala SAMSAT Kabupaten Bantul
Jl. Badegan No. 25, Nyangkringan, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul 55711
Di
Yogyakarta.

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan tugas mata kuliah, *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta.

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan ijin kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami, untuk melakukan Observasi/prasurvei di Kantor SAMSAT Kabupaten Bantul adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Yola Arinda Nastiti
No. Mahasiswa : 142180038
No. Telpn/HP : 085601452032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

DR. Sri Suharsih, M.Si
NIPPPK: 196912192021212008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Email : feb@upnyk.ac.id - Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Nomor : *60*/UN62.14/AKD.5/II/2022 Yogyakarta, 21 Februari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Observasi/Pra Survei

Yth.
Kepala SAMSAT Kota Yogyakarta
Jl. Tentara Pelajar No. 13, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta 55231
Di
Yogyakarta.

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan tugas mata kuliah, *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta.

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan ijin kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan mahasiswa kami, untuk melakukan Observasi/prasurvei di **Kantor SAMSAT Kota Yogyakarta** adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Yola Arinda Nastiti**
No. Mahasiswa : 142180038
No. Telp/HP : 085601452032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A. n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

DR. Sri Suharsih, M.Si
NIPPPK: 196912192021212008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Email : feb@upnyk.ac.id - Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Nomor : 60 /UN62.14/AKD.5/II/2022 Yogyakarta, 21 Februari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Observasi/Pra Survei

Yth.
Kepala SAMSAT Kabupaten Sleman
Jl. Magelang No. KM, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman 55514
Di
Yogyakarta.

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan tugas mata kuliah, *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta.

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan ijin kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami, untuk melakukan Observasi/prasurvei di **Kantor SAMSAT Kabupaten Sleman** adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Yola Arinda Nastiti**
No. Mahasiswa : 142180038
No. Telp/HP : 085601452032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

DR. Sri Suharsih, M.Si
NIPPPK: 196912192021212008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Email : feb@upnyk.ac.id - Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Nomor : 60 /UN62.14/AKD.5/II/2022 Yogyakarta, 21 Februari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Observasi/Pra Survei

Yth.
Kepala SAMSAT Kabupaten Sleman
Jl. Magelang No. KM, Krpyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman 55514
Di
Yogyakarta.

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan tugas mata kuliah, *Skripsi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Yogyakarta.

Melalui surat ini kami mengajukan permohonan ijin kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami, untuk melakukan Observasi/prasurvei di **Kantor SAMSAT Kabupaten Sleman** adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Yola Arinda Nastiti**
No. Mahasiswa : 142180038
No. Telp/HP : 085601452032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ain Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

DR. Sri Subarsih, M.Si
NIPPPK: 196912192021212008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : JL. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Sleman Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 487276, 486255, Faximile : (0274) 486255
Email : feb@upnyk.ac.id - Laman : <http://ekonomi.upnyk.ac.id>

Nomor : 95 /UN62.14/AKD.5/III/2022 Yogyakarta, 4 Maret 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Penewu Kapanewon Sentolo
Jl. Jogja – Wates Km. 19, Klebakan, Salamrejo Sentolo, Kulon progo
Di
Yogyakarta.

Dengan Hormat,
Sesuai dengan kurikulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta tentang kewajiban penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang menempuh Program Sarjana (S1).

Melalui surat ini mohon diijinkan mahasiswa kami :

Nama : **Yola Arinda Nastiti**
No Mhs : 142180038
No. Telpon/HP : 085601452032
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Untuk dapat memperoleh data/keterangan dan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan Skripsi dengan judul :
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kapanewon Sentolo, Kab. Kulonprogo);

Keterangan : a. Data yang diperoleh hanya untuk tulisan ilmiah
b. Lama mencari data ± 2 (bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



DR. Sri Suharsih, M.Si
NIDPPK: 196912192021212008



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON SENTOLO**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦤ꧀ꦠꦺꦴꦭꦺ

Jalan Yogya - Wates Km 19, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo
Telp. (0274) 6472118 Kode Pos 55664

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 0074

Menunjuk surat saudara Wakil Dekan bidang Akademik UPN " VETERAN " Yogyakarta Nomor 95/UN62.4/AKD.5/III/2022 tanggal 04 Maret 2022 perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini saya Panewu Sentolo atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: YOLA ARINDA NASTITI
NIM	: 142180038
Fakultas/ Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi
Telepon/email	: 085601452032
Waktu	: Selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Surat Rekomendasi
Judul	: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kapanewon Sentolo).

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah selesai melaksanakan kegiatan agar dapat memberi laporan hasil penelitian.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sentolo , 08 Maret 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PANEWU SENTOLO



RADEN SIGIT PURNOMO, S.IP.
Pembina / IVa
NIP. 196812021991031003

LAMPIRAN 2
KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir saya sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strara Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yola Arinda Nastiti

NIM : 142180038

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah ini untuk menyusun skripsi dengan judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)”**.

Melalui kesempatan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan (angket terlampir). Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga kerahasiaannya akan saya jaga.

Demikian surat pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Yola Arinda Nastiti
NIM: 142180038

KUISIONER PENELITIAN

Kuisisioner ini ditunjukkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kulonprogo. Untuk menciptakan hasil yang maksimal maka diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I dapat menjawab pernyataan dengan jujur.

IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk: Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan data pribadi anda.

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
3. Usia :

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i yang sebenarnya.

Poin Penilaian:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4

A. KESADARAN WAJIB PAJAK

Kuisisioner Kesadaran Wajib Pajak					
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saya bayarkan dapat digunakan untuk pembangunan daerah				
2	Ketika saya menunda untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) maka saya akan merugikan negara				
3	Saya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan sukarela tanpa paksaan				
4	Saya membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tepat waktu				
5	Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah				

B. SANKSI PAJAK

Kuisisioner Sanksi Pajak					
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku				
2	Sanksi pajak yang diberikan membuat saya tepat waktu dalam membayar pajak				
3	Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang menunggak ataupun yang terlambat membayar pajak				
4	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)				
5	Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak kendaraan bermotor				

C. SISTEM SAMASAT *DRIVE THRU*

Kuisisioner Sistem SAMASAT <i>Drive Thru</i>					
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Program sistem <i>drive thru</i> dapat lebih terkontrol dalam pendataan kendaraan bermotor				
2	Tata cara pembayaran pajak menggunakan sistem <i>drive thru</i> sulit untuk dilakukan				
3	Saya semakin berminat untuk terus menggunakan sistem <i>drive thru</i> dalam pembayaran pajak				
4	Pembayaran pajak dengan sistem <i>drive thru</i> dapat menghemat waktu				
5	Petugas sistem <i>drive thru</i> bersikap ramah, sopan dan terampil dalam melayani setiap wajib pajak				

D. TARIF PAJAK PROGRESIF

Kuisisioner Tarif Pajak Progresif					
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Tarif pajak yang di kenakan sudah sesuai tarif pajak daerah				
2	Besarnya pajak yang akan di bayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif PKB				
3	Tarif pajak progresif sesuai dengan peraturan daerah				
4	Dengan adanya tarif pajak progresif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah				
5	Saya sudah mengetahui tentang pengenaan tarif pajak progresif				

E. SOSIALISASI PERPAJAKAN

Kuisisioner Sosialisasi Perpajakan					
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Kantor Samsat memberikan informasi terkait dengan adanya pemberlakuan peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru				
2	Saya pernah mengikuti sosialisasi pajak yang diadakan oleh petugas Samsat				
3	Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang pajak dengan cepat dan mudah melalui internet				
4	Saya akan bertanya kepada petugas Samsat untuk minta penjelasan Ketika saya mendapatkan kesulitan terkait perpajakan				
5	Sosialisasi pajak yang saya dapat sangat membantu saya dalam memahami ketentuan pajak kendaraan bermotor				

F. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak					
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas dan saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan				
2	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB)				
3	Saya tidak pernah mendapat sanksi administrasi karena tidak pernah terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)				

4	Saya selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu				
5	Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor				

LAMPIRAN 3
TABULASI DATA RESPONDEN

1. Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Responden	Kesadaran Wajib Pajak					Total	Rata-Rata
	KPW 1	KPW 2	KPW 3	KPW 4	KPW 5		
1	4	4	4	4	4	20	4.0
2	4	4	4	4	4	20	4.0
3	4	4	4	4	3	19	3.8
4	3	3	3	3	3	15	3.0
5	3	2	3	3	2	13	2.6
6	3	1	2	4	3	13	2.6
7	3	3	3	3	4	16	3.2
8	3	3	3	3	3	15	3.0
9	3	2	3	3	4	15	3.0
10	4	4	4	3	3	18	3.6
11	3	3	3	4	3	16	3.2
12	4	4	4	4	4	20	4.0
13	2	2	2	2	2	10	2.0
14	4	3	4	4	4	19	3.8
15	4	4	4	4	4	20	4.0
16	3	3	3	3	3	15	3.0
17	4	3	4	4	4	19	3.8
18	4	4	4	4	4	20	4.0
19	4	4	4	4	4	20	4.0
20	4	4	4	4	4	20	4.0
21	3	4	4	4	3	18	3.6
22	4	4	4	4	4	20	4.0
23	4	4	4	4	4	20	4.0
24	3	4	4	4	3	18	3.6
25	4	1	4	4	3	16	3.2
26	4	1	4	4	4	17	3.4
27	4	4	4	4	4	20	4.0
28	3	2	3	4	3	15	3.0
29	3	3	3	4	3	16	3.2
30	4	4	4	4	4	20	4.0

31	4	4	4	4	2	18	3.6
32	4	3	3	4	4	18	3.6
33	4	4	4	4	4	20	4.0
34	3	3	3	3	3	15	3.0
35	3	3	3	3	3	15	3.0
36	4	2	4	3	3	16	3.2
37	4	3	3	3	3	16	3.2
38	3	2	4	4	3	16	3.2
39	3	3	4	4	4	18	3.6
40	3	3	3	3	3	15	3.0
41	4	3	4	4	4	19	3.8
42	4	3	4	4	4	19	3.8
43	3	2	3	3	3	14	2.8
44	3	2	3	3	3	14	2.8
45	3	2	3	3	3	14	2.8
46	3	3	3	3	3	15	3.0
47	3	3	4	4	4	18	3.6
48	3	3	4	3	3	16	3.2
49	2	1	2	2	3	10	2.0
50	3	3	3	3	3	15	3.0
51	3	3	3	3	3	15	3.0
52	4	3	4	3	3	17	3.4
53	3	2	3	3	2	13	2.6
54	3	3	2	3	3	14	2.8
55	3	3	3	3	3	15	3.0
56	3	3	3	2	3	14	2.8
57	4	3	4	4	4	19	3.8
58	2	3	3	3	3	14	2.8
59	4	4	4	4	4	20	4.0
60	4	3	4	4	3	18	3.6
61	3	3	2	4	3	15	3.0
62	4	4	4	4	4	20	4.0
63	3	3	2	4	3	15	3.0
64	4	4	4	3	3	18	3.6
65	4	4	4	3	4	19	3.8
66	3	3	3	3	3	15	3.0
67	3	3	3	3	3	15	3.0
68	3	3	3	3	3	15	3.0
69	4	4	3	3	4	18	3.6

70	3	3	3	3	3	15	3.0
71	4	3	3	3	4	17	3.4
72	3	3	3	3	3	15	3.0
73	4	3	3	4	3	17	3.4
74	3	2	3	3	3	14	2.8
75	3	3	3	3	3	15	3.0
76	3	3	4	4	3	17	3.4
77	4	3	4	4	4	19	3.8
78	3	3	3	4	3	16	3.2
79	4	3	3	3	4	17	3.4
80	4	4	4	3	4	19	3.8
81	3	3	3	3	4	16	3.2
82	3	3	3	3	3	15	3.0
83	3	3	3	3	3	15	3.0
84	3	3	4	3	3	16	3.2
85	4	3	3	3	3	16	3.2
86	3	3	3	3	3	15	3.0
87	4	4	4	4	4	20	4.0
88	4	3	4	4	3	18	3.6
89	3	3	3	4	4	17	3.4
90	4	4	4	3	4	19	3.8
91	3	3	3	3	3	15	3.0
92	4	3	4	4	4	19	3.8
93	3	3	3	3	3	15	3.0
94	3	4	3	3	3	16	3.2
95	3	4	3	3	3	16	3.2
96	3	3	2	3	3	14	2.8
97	4	4	4	4	4	20	4.0
98	4	3	3	3	3	16	3.2
99	3	4	3	3	3	16	3.2
100	3	4	3	3	3	16	3.2
101	3	4	3	3	3	16	3.2
102	3	3	3	3	3	15	3.0
103	3	2	3	2	3	13	2.6
104	3	3	3	3	4	16	3.2
105	3	3	3	3	3	15	3.0
106	4	3	3	3	3	16	3.2
107	4	3	3	3	3	16	3.2
108	3	4	3	3	3	16	3.2

109	3	3	3	3	3	15	3.0
110	3	3	3	3	3	15	3.0

2. Tabulasi Data Sanksi Pajak (X₂)

Responden	Sanksi Pajak					Total	Rata-Rata
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5		
1	4	4	4	4	4	20	4.0
2	4	4	4	4	4	20	4.0
3	4	4	4	3	4	19	3.8
4	3	3	3	3	3	15	3.0
5	4	3	4	4	3	18	3.6
6	2	4	2	3	3	14	2.8
7	3	3	2	3	3	14	2.8
8	4	3	4	4	3	18	3.6
9	4	3	3	3	2	15	3.0
10	4	3	4	4	4	19	3.8
11	3	2	4	4	2	15	3.0
12	4	4	4	4	2	18	3.6
13	2	2	2	2	2	10	2.0
14	4	4	4	4	3	19	3.8
15	4	4	4	4	4	20	4.0
16	4	2	4	4	3	17	3.4
17	4	2	4	2	4	16	3.2
18	4	4	4	4	4	20	4.0
19	4	4	4	4	4	20	4.0
20	4	4	4	4	4	20	4.0
21	3	4	3	4	3	17	3.4
22	4	4	4	4	4	20	4.0
23	4	4	4	4	4	20	4.0
24	4	4	4	4	3	19	3.8
25	4	4	4	4	4	20	4.0
26	3	3	4	3	4	17	3.4
27	4	4	4	4	4	20	4.0
28	3	3	3	3	3	15	3.0
29	3	4	4	4	3	18	3.6
30	4	4	4	4	4	20	4.0
31	4	4	4	4	4	20	4.0
32	3	3	4	4	3	17	3.4

33	4	4	4	4	4	20	4.0
34	4	2	3	3	4	16	3.2
35	3	3	3	3	3	15	3.0
36	4	2	3	3	4	16	3.2
37	3	3	3	3	3	15	3.0
38	4	3	3	4	3	17	3.4
39	3	3	3	4	3	16	3.2
40	4	2	3	3	4	16	3.2
41	4	3	4	4	2	17	3.4
42	4	3	4	4	3	18	3.6
43	3	1	2	2	3	11	2.2
44	3	1	2	2	3	11	2.2
45	3	2	3	3	2	13	2.6
46	3	3	3	3	4	16	3.2
47	3	3	3	3	3	15	3.0
48	3	1	2	2	3	11	2.2
49	3	1	2	2	3	11	2.2
50	3	2	3	3	2	13	2.6
51	3	3	3	3	3	15	3.0
52	4	3	4	4	4	19	3.8
53	3	3	2	3	3	14	2.8
54	4	4	4	3	3	18	3.6
55	3	2	3	3	3	14	2.8
56	3	2	3	3	3	14	2.8
57	4	4	3	3	3	17	3.4
58	3	2	3	4	3	15	3.0
59	4	3	3	4	3	17	3.4
60	3	3	4	4	3	17	3.4
61	3	4	4	4	3	18	3.6
62	4	2	4	3	4	17	3.4
63	3	4	4	4	3	18	3.6
64	3	3	3	3	3	15	3.0
65	3	3	3	3	2	14	2.8
66	3	3	3	3	3	15	3.0
67	2	3	3	3	3	14	2.8
68	3	3	3	3	3	15	3.0
69	4	4	4	4	4	20	4.0
70	3	2	3	3	3	14	2.8
71	3	3	3	3	3	15	3.0

72	3	3	3	3	3	15	3.0
73	3	3	3	3	3	15	3.0
74	3	3	3	3	3	15	3.0
75	3	3	3	3	3	15	3.0
76	4	4	3	3	3	17	3.4
77	4	3	3	3	3	16	3.2
78	4	3	4	4	4	19	3.8
79	3	3	3	3	3	15	3.0
80	3	3	3	3	3	15	3.0
81	3	4	4	3	3	17	3.4
82	3	3	3	3	3	15	3.0
83	3	3	3	3	3	15	3.0
84	3	3	4	3	3	16	3.2
85	4	2	3	3	2	14	2.8
86	3	3	3	3	3	15	3.0
87	4	3	4	3	3	17	3.4
88	4	3	4	3	3	17	3.4
89	3	4	4	4	4	19	3.8
90	4	4	4	3	2	17	3.4
91	3	3	3	3	3	15	3.0
92	3	4	3	3	3	16	3.2
93	3	3	3	3	3	15	3.0
94	4	4	3	3	3	17	3.4
95	4	4	3	3	3	17	3.4
96	3	3	3	3	3	15	3.0
97	4	4	4	4	4	20	4.0
98	3	3	3	3	3	15	3.0
99	4	4	3	3	3	17	3.4
100	4	4	3	3	3	17	3.4
101	4	4	3	3	3	17	3.4
102	3	3	3	3	3	15	3.0
103	3	2	2	3	3	13	2.6
104	3	4	4	4	4	19	3.8
105	3	3	3	3	3	15	3.0
106	3	3	3	3	3	15	3.0
107	3	3	3	3	3	15	3.0
108	3	3	3	3	3	15	3.0
109	3	3	3	3	3	15	3.0
110	3	3	3	3	3	15	3.0

3. Tabulasi Data Sistem Samsat *Drive Thru* (X₃)

Responde n	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>					Total	Rata- Rata
	SSDT 1	SSDT 2	SSDT 3	SSDT 4	SSDT 5		
1	4	2	3	4	3	16	3.2
2	4	3	4	4	4	20	3.8
3	4	2	4	4	4	17	3.6
4	2	2	2	2	3	11	2.2
5	3	2	2	3	3	13	2.6
6	2	3	3	3	3	14	2.8
7	3	3	3	3	2	14	2.8
8	2	2	2	3	3	12	2.4
9	3	2	3	3	3	14	2.8
10	4	2	4	4	4	18	3.6
11	3	2	3	4	3	15	3.0
12	4	2	4	4	3	16	3.4
13	2	2	2	2	2	10	2.0
14	4	2	4	4	4	17	3.6
15	4	2	4	4	4	18	3.6
16	3	2	3	4	4	15	3.2
17	2	2	4	4	4	15	3.2
18	4	4	4	4	4	20	4.0
19	4	2	4	4	4	17	3.6
20	4	2	4	4	4	17	3.6
21	3	3	3	3	3	15	3.0
22	4	2	4	4	3	17	3.4
23	4	2	4	4	4	17	3.6
24	3	2	3	3	3	14	2.8
25	4	2	4	4	1	14	3.0
26	4	3	4	3	3	17	3.4
27	4	2	4	4	4	17	3.6
28	3	2	3	3	3	14	2.8
29	3	2	2	3	3	13	2.6
30	4	2	4	4	4	17	3.6
31	4	4	4	4	4	20	4.0
32	3	2	3	4	4	16	3.2
33	3	2	3	4	4	16	3.2
34	3	4	3	4	3	17	3.4
35	3	2	3	3	3	14	2.8

36	3	2	3	3	3	14	2.8
37	3	2	3	3	3	14	2.8
38	3	3	3	4	4	17	3.4
39	3	3	3	3	3	15	3.0
40	3	4	3	4	3	17	3.4
41	3	2	2	3	3	13	2.6
42	3	2	2	3	3	13	2.6
43	3	2	3	3	3	14	2.8
44	3	2	3	3	3	14	2.8
45	3	2	3	3	3	14	2.8
46	3	3	3	3	3	15	3.0
47	3	3	3	3	4	16	3.2
48	3	2	3	3	3	14	2.8
49	3	2	3	3	3	14	2.8
50	3	3	3	3	3	15	3.0
51	2	2	3	3	3	13	2.6
52	4	2	3	4	3	16	3.2
53	3	4	4	4	4	19	3.8
54	3	3	3	3	3	15	3.0
55	4	2	4	4	4	18	3.6
56	3	2	3	3	2	13	2.6
57	4	2	3	3	3	15	3.0
58	3	2	3	3	3	14	2.8
59	3	2	3	3	3	14	2.8
60	3	2	3	3	3	14	2.8
61	4	3	3	3	3	16	3.2
62	4	4	3	4	3	18	3.6
63	4	3	3	3	3	16	3.2
64	3	2	3	3	3	14	2.8
65	3	2	3	3	3	14	2.8
66	2	2	3	4	2	13	2.6
67	3	3	3	3	3	15	3.0
68	3	2	4	4	4	16	3.4
69	3	2	3	3	3	14	2.8
70	3	2	3	3	3	14	2.8
71	3	2	3	3	3	14	2.8
72	3	2	3	3	2	13	2.6
73	3	2	3	3	3	14	2.8
74	3	2	2	2	3	12	2.4

75	3	2	3	3	3	14	2.8
76	3	2	3	3	3	14	2.8
77	3	2	3	3	3	13	2.8
78	3	2	3	4	4	16	3.2
79	2	2	3	4	2	13	2.6
80	3	2	4	4	3	16	3.2
81	4	2	3	3	3	15	3.0
82	3	2	3	3	3	14	2.8
83	2	2	3	3	3	13	2.6
84	2	3	2	3	3	13	2.6
85	3	3	2	3	3	14	2.8
86	3	3	3	3	3	15	3.0
87	4	3	3	3	4	17	3.4
88	3	3	3	3	3	15	3.0
89	4	3	4	3	4	18	3.6
90	4	3	4	3	4	18	3.6
91	3	3	3	3	3	15	3.0
92	4	3	3	4	3	17	3.4
93	3	2	3	3	3	14	2.8
94	3	2	3	3	3	14	2.8
95	3	2	3	3	3	14	2.8
96	3	3	3	3	3	15	3.0
97	4	2	4	4	4	17	3.6
98	3	2	3	4	3	14	3.0
99	3	2	3	3	4	14	3.0
100	3	2	3	3	4	14	3.0
101	3	2	3	3	4	14	3.0
102	3	2	3	3	3	13	2.8
103	3	2	3	3	3	14	2.8
104	3	2	3	3	3	14	2.8
105	3	2	3	3	3	14	2.8
106	3	2	3	3	3	14	2.8
107	3	3	3	2	3	14	2.8
108	3	2	3	3	3	13	2.8
109	3	2	3	3	3	14	2.8
110	2	2	3	3	3	13	2.6

4. Tabulasi Data Traif Pajak Progresif (X₄)

Responde n	Tarif Pajak Progresif					Total	Rata- Rata
	TPP 1	TPP 2	TPP 3	TPP 4	TPP 5		
1	3	3	3	4	2	15	3.0
2	4	4	4	4	4	20	4.0
3	2	4	1	1	3	11	2.2
4	3	3	3	3	3	15	3.0
5	3	3	3	3	2	14	2.8
6	2	2	2	2	2	10	2.0
7	2	3	2	2	1	10	2.0
8	3	3	3	3	2	14	2.8
9	3	3	3	3	3	15	3.0
10	4	4	4	4	4	20	4.0
11	3	3	2	2	2	12	2.4
12	4	4	4	4	4	20	4.0
13	2	2	2	2	2	10	2.0
14	4	4	4	4	4	20	4.0
15	4	4	4	4	4	20	4.0
16	3	3	3	3	3	15	3.0
17	4	4	4	4	4	20	4.0
18	4	4	4	4	4	20	4.0
19	4	4	4	4	4	20	4.0
20	4	4	4	4	4	20	4.0
21	3	3	4	3	3	16	3.2
22	3	3	3	3	2	14	2.8
23	4	4	4	4	4	20	4.0
24	3	3	3	3	2	14	2.8
25	4	4	4	4	4	20	4.0
26	4	4	3	3	4	18	3.6
27	4	4	4	4	4	20	4.0
28	3	2	2	3	3	13	2.6
29	3	3	3	3	2	14	2.8
30	4	4	4	3	4	19	3.8
31	4	4	4	4	4	20	4.0
32	2	2	3	3	2	12	2.4
33	4	4	4	4	3	19	3.8
34	3	3	3	3	3	15	3.0
35	3	3	3	3	3	15	3.0

36	4	3	4	4	3	18	3.6
37	3	3	3	3	2	14	2.8
38	4	3	4	4	4	19	3.8
39	3	3	3	3	3	15	3.0
40	3	3	4	3	3	16	3.2
41	3	3	3	4	2	15	3.0
42	3	3	3	4	2	15	3.0
43	3	3	3	3	2	14	2.8
44	3	3	3	3	2	14	2.8
45	3	3	3	3	2	14	2.8
46	3	3	3	3	2	14	2.8
47	3	3	3	3	3	15	3.0
48	3	3	3	3	2	14	2.8
49	3	3	3	3	2	14	2.8
50	3	3	3	3	2	14	2.8
51	3	3	3	3	3	15	3.0
52	3	3	3	3	3	15	3.0
53	3	3	3	3	3	15	3.0
54	3	3	3	3	3	15	3.0
55	3	3	3	3	3	15	3.0
56	2	3	3	3	2	13	2.6
57	3	3	3	3	3	15	3.0
58	3	2	3	3	3	14	2.8
59	3	3	3	3	3	15	3.0
60	4	4	3	3	3	17	3.4
61	3	3	3	3	3	15	3.0
62	4	4	4	4	3	19	3.8
63	3	3	3	3	3	15	3.0
64	3	3	3	3	3	15	3.0
65	3	3	3	3	3	15	3.0
66	2	2	3	3	2	12	2.4
67	3	2	3	3	3	14	2.8
68	3	3	3	3	3	15	3.0
69	4	4	3	3	3	17	3.4
70	2	3	2	3	2	12	2.4
71	3	3	3	3	3	15	3.0
72	3	3	3	3	3	15	3.0
73	3	3	3	3	3	15	3.0
74	3	3	3	3	3	15	3.0

75	3	3	3	3	3	15	3.0
76	3	3	3	3	3	15	3.0
77	4	3	3	3	3	16	3.2
78	3	3	3	3	3	15	3.0
79	3	3	3	3	2	14	2.8
80	3	3	3	4	3	16	3.2
81	3	4	3	3	3	16	3.2
82	3	2	3	3	2	13	2.6
83	3	3	3	3	3	15	3.0
84	3	3	3	3	3	15	3.0
85	3	3	3	3	2	14	2.8
86	3	3	3	3	3	15	3.0
87	3	4	3	4	4	18	3.6
88	3	3	3	3	3	15	3.0
89	3	4	3	3	3	16	3.2
90	4	3	4	3	3	17	3.4
91	3	3	3	3	3	15	3.0
92	3	4	3	3	2	15	3.0
93	3	3	3	3	3	15	3.0
94	3	3	3	3	3	15	3.0
95	3	3	3	3	3	15	3.0
96	3	3	3	3	3	15	3.0
97	4	3	3	3	3	16	3.2
98	3	3	3	3	3	15	3.0
99	4	3	4	4	3	18	3.6
100	4	3	4	4	3	18	3.6
101	4	3	4	4	3	18	3.6
102	3	3	3	3	3	15	3.0
103	3	3	3	3	3	15	3.0
104	3	3	3	3	2	14	2.8
105	3	3	3	3	3	15	3.0
106	3	3	3	3	3	15	3.0
107	3	3	3	3	3	15	3.0
108	3	3	3	3	2	14	2.8
109	3	3	3	3	3	15	3.0
110	3	3	3	3	3	15	3.0

5. Tabulasi Data Sosialisasi Perpajakan (X_5)

Responde n	Sosialisasi Perpajakan					Total	Rata- Rata
	SOP 1	SOP 2	SOP 3	SOP 4	SOP 5		
1	3	2	3	3	3	14	2.8
2	4	4	4	4	4	20	4.0
3	4	3	4	4	4	19	3.8
4	3	1	3	3	1	11	2.2
5	3	2	3	3	3	14	2.8
6	3	2	4	4	4	17	3.4
7	1	1	2	1	1	6	1.2
8	3	2	3	3	3	14	2.8
9	2	1	3	4	3	13	2.6
10	4	1	4	3	4	16	3.2
11	2	2	3	3	3	13	2.6
12	2	1	3	3	3	12	2.4
13	1	1	1	1	1	5	1.0
14	4	2	3	4	2	15	3.0
15	4	4	4	4	4	20	4.0
16	3	3	3	4	3	16	3.2
17	4	4	4	4	4	20	4.0
18	4	4	4	4	4	20	4.0
19	4	4	4	4	4	20	4.0
20	4	4	4	4	4	20	4.0
21	3	4	3	3	3	16	3.2
22	3	3	3	3	3	15	3.0
23	4	1	4	4	4	17	3.4
24	3	2	3	3	3	14	2.8
25	4	1	4	4	4	17	3.4
26	4	3	4	4	4	19	3.8
27	4	1	4	4	4	17	3.4
28	2	2	3	3	2	12	2.4
29	2	2	3	3	3	13	2.6
30	4	3	4	4	4	19	3.8
31	4	4	4	4	4	20	4.0
32	4	1	3	3	3	14	2.8
33	4	2	4	4	3	17	3.4
34	3	4	4	3	4	18	3.6
35	3	2	3	3	3	14	2.8

36	4	4	3	4	3	18	3.6
37	3	3	3	3	3	15	3.0
38	4	3	3	3	4	17	3.4
39	3	3	3	3	3	15	3.0
40	3	4	4	3	4	18	3.6
41	3	3	3	4	4	17	3.4
42	3	3	3	4	4	17	3.4
43	3	2	3	3	2	13	2.6
44	3	2	3	3	2	13	2.6
45	2	2	2	2	2	10	2.0
46	3	3	3	3	3	15	3.0
47	3	3	3	3	3	15	3.0
48	3	3	3	3	3	15	3.0
49	3	1	2	3	3	12	2.4
50	2	2	2	2	2	10	2.0
51	3	2	3	4	4	16	3.2
52	3	2	3	4	4	16	3.2
53	3	3	3	3	3	15	3.0
54	3	2	3	3	3	14	2.8
55	4	3	4	4	3	18	3.6
56	2	2	3	2	3	12	2.4
57	4	3	4	4	4	19	3.8
58	3	2	3	3	3	14	2.8
59	3	2	3	3	3	14	2.8
60	3	2	3	3	3	14	2.8
61	3	2	3	3	2	13	2.6
62	2	1	2	3	1	9	1.8
63	3	2	3	3	2	13	2.6
64	3	2	3	3	2	13	2.6
65	2	2	3	3	2	12	2.4
66	2	2	3	3	3	13	2.6
67	3	3	3	3	3	15	3.0
68	3	4	3	3	4	17	3.4
69	4	3	3	3	3	16	3.2
70	3	2	3	3	3	14	2.8
71	4	3	4	4	3	18	3.6
72	3	2	3	3	3	14	2.8
73	3	4	3	3	4	17	3.4
74	3	3	3	3	3	15	3.0

75	2	2	3	3	2	12	2.4
76	3	2	3	3	3	14	2.8
77	3	3	3	4	4	17	3.4
78	3	3	3	3	3	15	3.0
79	3	2	3	3	2	13	2.6
80	3	2	3	3	3	14	2.8
81	3	3	3	3	3	15	3.0
82	3	2	3	3	2	13	2.6
83	3	2	3	3	3	14	2.8
84	3	2	3	3	3	14	2.8
85	2	3	3	3	3	14	2.8
86	3	3	3	3	3	15	3.0
87	3	3	3	3	3	15	3.0
88	3	2	3	3	4	15	3.0
89	3	3	4	3	3	16	3.2
90	4	4	3	4	4	19	3.8
91	3	3	3	3	3	15	3.0
92	4	4	3	3	3	17	3.4
93	3	3	3	3	3	15	3.0
94	3	3	4	4	4	18	3.6
95	3	3	4	4	4	18	3.6
96	3	3	3	3	3	15	3.0
97	3	3	3	3	3	15	3.0
98	4	4	3	3	3	17	3.4
99	4	3	4	4	4	19	3.8
100	4	3	4	4	4	19	3.8
101	4	3	4	4	4	19	3.8
102	3	3	3	3	3	15	3.0
103	3	3	3	3	3	15	3.0
104	3	3	3	3	3	15	3.0
105	3	2	3	3	3	14	2.8
106	4	4	3	3	3	17	3.4
107	4	4	3	3	3	17	3.4
108	3	2	3	3	3	14	2.8
109	3	2	3	3	3	14	2.8
110	3	2	3	3	3	14	2.8

6. Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Responde n	Kepatuhan Wajib Pajak					Total	Rata- Rata
	KTW P 1	KTW P 2	KTW P 3	KTW P 4	KTW P 5		
1	3	3	4	4	4	18	3.6
2	4	4	4	4	4	20	4.0
3	4	3	4	4	4	19	3.8
4	3	3	3	3	3	15	3.0
5	3	3	2	3	3	14	2.8
6	4	4	3	3	2	16	3.2
7	3	1	1	1	3	9	1.8
8	3	2	2	2	3	12	2.4
9	3	3	3	3	3	15	3.0
10	4	3	4	4	4	19	3.8
11	3	2	4	4	4	17	3.4
12	3	3	3	4	4	17	3.4
13	1	1	1	1	1	5	1.0
14	4	3	4	4	4	19	3.8
15	4	4	4	4	4	20	4.0
16	3	2	2	2	3	12	2.4
17	4	4	3	3	4	18	3.6
18	4	4	4	4	4	20	4.0
19	4	4	4	4	4	20	4.0
20	4	3	4	4	4	19	3.8
21	3	3	3	3	3	15	3.0
22	4	4	4	4	4	20	4.0
23	4	4	4	4	4	20	4.0
24	3	3	3	3	4	16	3.2
25	4	4	4	4	4	20	4.0
26	4	4	4	4	4	20	4.0
27	4	4	4	4	4	20	4.0
28	3	3	3	3	3	15	3.0
29	3	4	4	4	4	19	3.8
30	4	4	3	4	4	19	3.8
31	4	4	4	4	4	20	4.0
32	4	3	4	4	4	19	3.8
33	4	4	4	4	4	20	4.0
34	3	3	3	3	3	15	3.0
35	3	3	3	3	3	15	3.0

36	3	4	3	4	4	18	3.6
37	3	3	3	3	3	15	3.0
38	4	4	3	2	4	17	3.4
39	4	4	3	4	4	19	3.8
40	3	3	4	4	3	17	3.4
41	3	4	2	3	4	16	3.2
42	3	4	2	3	4	16	3.2
43	3	3	3	3	3	15	3.0
44	3	3	3	3	3	15	3.0
45	3	2	2	2	3	12	2.4
46	3	3	3	3	3	15	3.0
47	3	3	3	3	3	15	3.0
48	3	3	3	3	3	15	3.0
49	3	3	3	3	3	15	3.0
50	3	2	2	2	3	12	2.4
51	3	3	2	3	3	14	2.8
52	3	3	2	3	3	14	2.8
53	3	3	3	3	3	15	3.0
54	3	3	3	3	4	16	3.2
55	3	3	3	3	3	15	3.0
56	3	2	2	2	3	12	2.4
57	4	4	4	4	4	20	4.0
58	3	3	3	3	3	15	3.0
59	4	4	3	4	4	19	3.8
60	3	3	3	3	3	15	3.0
61	3	3	3	3	3	15	3.0
62	3	4	4	4	4	19	3.8
63	3	3	3	3	3	15	3.0
64	3	3	3	3	3	15	3.0
65	3	3	3	3	3	15	3.0
66	3	4	3	3	3	16	3.2
67	3	4	3	3	3	16	3.2
68	3	3	3	3	3	15	3.0
69	3	3	3	3	3	15	3.0
70	3	3	3	3	3	15	3.0
71	4	3	3	3	3	16	3.2
72	3	3	3	3	3	15	3.0
73	3	3	3	3	3	15	3.0
74	3	3	3	3	3	15	3.0

75	3	3	3	3	3	15	3.0
76	3	3	3	3	3	15	3.0
77	4	4	4	4	4	20	4.0
78	3	3	4	4	4	18	3.6
79	3	2	2	2	3	12	2.4
80	3	2	2	2	4	13	2.6
81	3	3	4	4	4	18	3.6
82	3	3	3	3	3	15	3.0
83	3	3	3	3	3	15	3.0
84	3	3	3	3	3	15	3.0
85	3	3	3	4	4	17	3.4
86	3	3	3	3	3	15	3.0
87	3	3	3	3	3	15	3.0
88	3	3	3	3	4	16	3.2
89	3	3	3	3	3	15	3.0
90	3	4	3	3	4	17	3.4
91	3	3	3	3	3	15	3.0
92	4	4	3	3	3	17	3.4
93	3	3	3	3	3	15	3.0
94	3	4	4	4	4	19	3.8
95	3	4	4	4	4	19	3.8
96	3	3	3	3	3	15	3.0
97	4	4	3	4	4	19	3.8
98	3	3	3	3	3	15	3.0
99	4	4	4	4	4	20	4.0
100	4	4	4	4	4	20	4.0
101	4	4	4	4	4	20	4.0
102	3	3	3	3	3	15	3.0
103	3	2	2	2	3	12	2.4
104	3	4	3	3	3	16	3.2
105	3	3	3	3	3	15	3.0
106	3	3	3	3	3	15	3.0
107	3	3	3	3	3	15	3.0
108	3	3	3	3	3	15	3.0
109	3	3	3	3	3	15	3.0
110	3	3	3	3	3	15	3.0

LAMPIRAN 4
FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak					
Pernyataan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Total
1	0	2,7	55,5	41,8	100%
2	3,6	10,9	56,4	29,1	100%
3	0	6,4	53,6	40,0	100%
4	0	3,6	55,5	40,9	100%
5	0	3,6	61,8	34,5	100%
Rata-rata	0,72	5,44	56,56	37,26	100%

2. Variabel Sanksi Pajak

Sanksi Pajak					
Pernyataan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Total
1	0	2,7	53,6	43,6	100%
2	3,6	14,5	48,2	33,6	100%
3	0	8,2	51,8	40,0	100%
4	0	5,5	59,1	35,5	100%
5	0	9,1	65,5	25,5	100%
Rata-rata	0,72	8,0	55,64	35,64	100%

3. Variabel Sistem Samsar *Drive Thru*

Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>					
Pernyataan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Total
1	0	10,0	63,6	26,4	100%
2	0	71,8	22,7	5,5	100%
3	0	9,1	69,1	21,8	100%
4	0	3,6	63,6	32,7	100%
5	0,9	5,5	67,3	26,4	100%
Rata-rata	0,18	20,0	57,26	22,56	100%

4. Variabel Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif					
Pernyataan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Total
1	0	7,3	68,2	24,5	100%
2	0	7,3	70,9	21,8	100%
3	0,9	5,5	71,8	21,8	100%
4	0,9	3,6	72,7	22,7	100%
5	0,9	26,4	57,3	15,5	100%
Rata-rata	0,54	10,02	68,18	21,26	100%

5. Variabel Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan					
Pernyataan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Total
1	1,8	11,8	58,2	28,2	100%
2	10,9	37,3	35,5	16,4	100%
3	0,9	4,5	70,0	24,5	100%
4	1,8	2,7	65,5	30,0	100%
5	3,6	11,8	54,5	30,0	100%
Rata-rata	3,8	13,62	56,74	25,82	100%

6. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak					
Pernyataan	STS (%)	TS (%)	S (%)	SS (%)	Total
1	0,9	0	71,8	27,3	100%
2	1,8	8,2	58,2	31,8	100%
3	1,8	11,8	59,1	27,3	100%
4	1,8	8,2	56,4	33,6	100%
5	0,9	0,9	57,3	40,9	100%
Rata-rata	1,44	8,18	60,56	32,18	100%

LAMPIRAN 5
HASIL OLAHAN DATA STATISTIK

1. Hasil Uji Validitas

a. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

		Correlations					
		KWP_1	KWP_2	KWP_3	KWP_4	KWP_5	TOTAL_KWP
KWP_1	Pearson Correlation	1	.724**	.848**	.667**	.704**	.928**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KWP_2	Pearson Correlation	.724**	1	.737**	.415*	.583**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.023	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KWP_3	Pearson Correlation	.848**	.737**	1	.611**	.561**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KWP_4	Pearson Correlation	.667**	.415*	.611**	1	.574**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.023	.000		.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KWP_5	Pearson Correlation	.704**	.583**	.561**	.574**	1	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.001		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_KWP	Pearson Correlation	.928**	.838**	.889**	.758**	.809**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

		Correlations					
		SP_1	SP_2	SP_3	SP_4	SP_5	TOTAL_SP
SP_1	Pearson Correlation	1	.415*	.830**	.605**	.484**	.854**
	Sig. (2-tailed)		.023	.000	.000	.007	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SP_2	Pearson Correlation	.415*	1	.338	.476**	.439*	.704**
	Sig. (2-tailed)	.023		.068	.008	.015	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SP_3	Pearson Correlation	.830**	.338	1	.674**	.468**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.068		.000	.009	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SP_4	Pearson Correlation	.605**	.476**	.674**	1	.322	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000		.083	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SP_5	Pearson Correlation	.484**	.439*	.468**	.322	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.007	.015	.009	.083		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_SP	Pearson Correlation	.854**	.704**	.847**	.781**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Hasil Uji Validitas Sistem Samsat Drive Thru

		Correlations					
		SSDT_1	SSDT_2	SSDT_3	SSDT_4	SSDT_5	TOTAL_SS DT
SSDT_1	Pearson Correlation	1	-.008	.668**	.715**	.478**	.779**
	Sig. (2-tailed)		.967	.000	.000	.008	.000
	N	30	30	30	30	30	30

SSDT_2	Pearson Correlation	-.008	1	.190	.046	.088	.407*
	Sig. (2-tailed)	.967		.316	.810	.645	.026
	N	30	30	30	30	30	30
SSDT_3	Pearson Correlation	.668**	.190	1	.819**	.743**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.316		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SSDT_4	Pearson Correlation	.715**	.046	.819**	1	.746**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.810	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SSDT_5	Pearson Correlation	.478**	.088	.743**	.746**	1	.766**
	Sig. (2-tailed)	.008	.645	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_SSDT	Pearson Correlation	.779**	.407*	.871**	.845**	.766**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.026	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak Progresif

		Correlations					TOTAL_TP
		TPP_1	TPP_2	TPP_3	TPP_4	TPP_5	P
TPP_1	Pearson Correlation	1	.733**	.886**	.819**	.840**	.954**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
TPP_2	Pearson Correlation	.733**	1	.581**	.551**	.714**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
TPP_3	Pearson Correlation	.886**	.581**	1	.947**	.778**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
TPP_4	Pearson Correlation	.819**	.551**	.947**	1	.686**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000	.000

	N	30	30	30	30	30	30
TPP_5	Pearson Correlation	.840**	.714**	.778**	.686**	1	.901**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_TPP	Pearson Correlation	.954**	.784**	.941**	.898**	.901**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

e. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

		Correlations					
		SOP_1	SOP_2	SOP_3	SOP_4	SOP_5	TOTAL_SOP
SOP_1	Pearson Correlation	1	.678**	.828**	.770**	.616**	.892**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOP_2	Pearson Correlation	.678**	1	.603**	.556**	.642**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOP_3	Pearson Correlation	.828**	.603**	1	.811**	.772**	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOP_4	Pearson Correlation	.770**	.556**	.811**	1	.678**	.866**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SOP_5	Pearson Correlation	.616**	.642**	.772**	.678**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_SOP	Pearson Correlation	.892**	.826**	.908**	.866**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

f. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

		Correlations					
		KTW P_1	KTW P_2	KTW P_3	KTW P_4	KTW P_5	TOTAL_KTW P
KTWP_1	Pearson Correlation	1	.674**	.696**	.665**	.670**	.835**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KTWP_2	Pearson Correlation	.674**	1	.672**	.700**	.440*	.805**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.015	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KTWP_3	Pearson Correlation	.696**	.672**	1	.940**	.745**	.940**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KTWP_4	Pearson Correlation	.665**	.700**	.940**	1	.770**	.945**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KTWP_5	Pearson Correlation	.670**	.440*	.745**	.770**	1	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.015	.000	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL_KTWP	Pearson Correlation	.835**	.805**	.940**	.945**	.824**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Realibilitas

a. Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	6

b. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.800	6

c. Hasil Uji Reliabilitas Sistem Samsat *Drive Thru*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.797	6

d. Hasil Uji Reliabilitas Tarif Pajak Progresif

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.825	6

e. Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.818	6

f. Hasil Uji Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.821	6

3. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	2.40	4.00	3.4255	.36459
Sanksi Pajak	110	2.00	4.00	3.2618	.46353
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	110	2.00	4.00	3.0218	.38250
Tarif Pajak Progresif	110	2.00	4.00	3.1018	.46590
Sosialisasi Perpajakan	110	1.00	4.00	3.0455	.55167
Kepatuhan Wajib Pajak	110	1.00	4.00	3.2345	.52312
Valid N (listwise)	110				

4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	110	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.61581486
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.057
Test Statistic	.064	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.363	1.445		-.251	.802
	Kesadaran Wajib Pajak	.261	.103	.223	2.531	.013
	Sanksi Pajak	.232	.103	.205	2.248	.027
	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	.043	.110	.030	.387	.700
	Tarif Pajak Progresif	.153	.097	.137	1.583	.117
	Sosialisasi Perpajakan	.356	.073	.376	4.896	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	461.135	5	92.227	33.704	.000 ^b
	Residual	284.583	104	2.736		
	Total	745.718	109			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat *Drive Thru*, Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.600	1.65420
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> , Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

d. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.363	1.445		-.251	.802
	Kesadaran Wajib Pajak	.261	.103	.223	2.531	.013
	Sanksi Pajak	.232	.103	.205	2.248	.027
	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	.043	.110	.030	.387	.700
	Tarif Pajak Progresif	.153	.097	.137	1.583	.117
	Sosialisasi Perpajakan	.356	.073	.376	4.896	.000
	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

LAMPIRAN 6**DOKUMENTASI PENYEBARAN KUESIONER**